

# **MODUL**

## **MANAJEMEN PENDIDIKAN NONFORMAL**



Oleh

**Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd.**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2019**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan diktat ini. Adapun penyusunan modul ini bertujuan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Nonformal dengan beban 2 sks.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan diktat ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Asep Kurniawan, M.Ag selaku dosen Manajemen Pendidikan Islam
2. Dr. H. Sumanta, M.Ag. selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Dr. H. Farihin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Dr. Mumun Munawaroh, M.Si. selaku sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
5. Kepada seluruh Dosen dan staf Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
6. Istri dan anak-anak tercinta


Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang masih sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga diktat ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama, serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Amin

Cirebon, Pebruari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Silabus.....	iv
Bab 1 Konsep Dasar Lembaga Pendidikan Nonformal.....	1
Bab 2 Karakteristik Lembaga Pendidikan Nonformal .....	20
Bab 3 Ragam Jenis Dan Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (Kursus Dan Magang).....	34
Bab 4 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Penyuluhan dan Kelompok Belajar).....	48
Bab 5 Manajemen Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal ...	61
Bab 6 Perencanaan Strategis Lembaga Pendidikan Non Formal .....	81
Bab 7 Rencana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ...	88
Bab 8 Pengaturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Bagi Warga Belajar .....	102
Bab 9 Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.....	112
Bab 10 Mengatur Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Nonform ....	125

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON</b>			
	<b>RPS</b>			
	<b>MPI</b>	<b>REVISI: 00</b>	<b>Pebruari 2019</b>	<b>Hal</b>
	<b>SEMESTER 3</b>	<b>Judul/praktek-</b>		<b>100 MENIT</b>

### 1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	Manajemen Pendidikan Non Formal
Jumlah SKS	2
Semester	3
Kelompok Mata Kuliah	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
Jurusan	Manajemen Pendidikan Islam
Dosen/Pengampu	Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd.

### 2. Deskripsi Isi

Matakuliah manajemen pendidikan luar sekolah memberikan wawasan tentang karakteristik dan macam ragam pendidikan nonformal, serta konsep dasar dan keterampilan manajemen untuk mengelola lembaga pendidikan nonformal yang meliputi keterampilan merencanakan, tekanan kajian dipusatkan pada perencanaan strategi dan rencana operasional. Keterampilan selanjutnya, pengaturan pelaksanaan, lembaga pendidikan nonformal tercakup didalamnya prinsip dan aplikasi andragogi. Keterampilan berikutnya adalah evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Kuliah dilaksanakan dengan cara lisan, tatap muka dengan pendekatan andragogi. Evaluasi dilakukan secara portofolio, penilaian dilakukan dengan menggunakan standar/patokan yang telah ditetapkan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 4. Pendekatan Pembelajaran

1. Pre-Test
2. Ceramah
3. Penugasan:
  - a. Seminar/Presentasi Tentang
  - b. Pelaporan Hasil Seminar/Presentasi dalam bentuk makalah
  - c. Praktek dalam pendidikan non formal

Keterangan Penugasan:

1. Secara berkelompok ....., mahasiswa membuat kajian salah satu pokok bahasan yang ditugaskan kepada kelompoknya dalam bentuk makalah diserahkan baik hard copy maupun soft copy.

2. Mahasiswa secara berkelompok ..... mempresentasikan hasil kajian kelompoknya sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa membuat kegiatan berupa pelatihan atau seminar

### 5. Komponen Evaluasi

Komponen Bobot Penilaian:

No.	Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai Maksimal
1	Kehadiran	5%	1. 75% s.d. 100% hadir x Bobot 2. Kurang dari 75% = 0	5
2	Tugas-Tugas	20%	Sangat Lengkap = 100 Lengkap = 80 Cukup Lengkap = 60 Kurang Lengkap = 40 Tak ada = 0	20
3	UTS	25%	Khusus 0 – 100	25
4	UAS	50%	Khusus 0 – 100	50
Jumlah Nilai Akhir				100

Contoh:

Mahasiswa A:

No.	Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai
1	Kehadiran	5%	75%	3,75
2	Tugas-Tugas	20%	Tak Lngkap = 40	8
3	UTS	25%	85	21,25
4	UAS	50%	75	37,5
Jumlah Nilai Akhir				70,5

### 6. Rincian Meteri Perkuliahan Tiap Pertemuan

Pertemuan	PokokBahasan	Tujuan Perkuliahan	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1	Pre-test dan Prolog	Memberi penguasaan konsep dasar dan karakteristik lembaga pendidikan nonform	Konsep dasar lembaga pendidikan nonformal: 1. kedudukan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional 2. peran pendidikan nonformal dalam pembangunan bangsa
2	karakteristik lembaga pendidikan nonformal	Mengenalkan karakteristik lembaga pendidikan nonformal	Karakteristik lembaga pendidikan nonformal. dari segi tujuan, waktu, warga belajar, strategi,

			sarana dan evaluasi
3	ragam bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal	Mengenalkan ragam bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal	Ragam jenis dan bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal: 1. kursus 2. magang
4	ragam bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal	Mengenalkan ragam bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal	Ragam jenis dan bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal: 3. penyuluhan 4. kelompok bermain
5	manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal	Mengenalkan konsep manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal	Manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal: 1. permasalahan dalam manajemen pendidikan nonformal 2. prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan nonformal
6	manajemen keterampilan merencanakan lembaga pendidikan nonformal	Membahas dan berlatih keterampilan manajemen keterampilan merencanakan lembaga pendidikan nonformal	Merencanakan strategi penyelenggaraan pendidikan nonformal:
7		Membahas dan berlatih keterampilan manajemen keterampilan merencanakan lembaga pendidikan nonformal	Merencanakan secara operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal
8		Membahas dan berlatih keterampilan manajemen dalam pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan	Pengaturan warga belajar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal

		nonformal	
9	UTS		
10		Membahas dan berlatih keterampilan manajemen dalam pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal	Pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal : pengaturan warga belajar
11		Membahas dan berlatih keterampilan manajemen dalam pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal	Pengaturan sumber belajar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal
12		Membahas dan berlatih keterampilan manajemen dalam pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal	pelaksanaan pengaturan sumber belajar dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal
13		Memberi pengetahuan teoritik dan ketrampilan manajemen praksis tentang evaluasi penyelenggaraan	Mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal : pengaturan warga belajar
14		Memberi pengetahuan teoritik dan ketrampilan manajemen praksis tentang evaluasi penyelenggaraan	Pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal : pengaturan sumber belajar
15		Memberi pengetahuan teoritik dan ketrampilan manajemen praksis tentang evaluasi penyelenggaraan	Mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal : pengaturan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nonformal
16	UAS		

# **BAB I**

## **KONSEP DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL**

### **A. Tujuan Pembelajaran**

- Untuk mengetahui Pengertian dan Konsep Dasar Pendidikan Non Formal
- Untuk mengetahui Kedudukan Pendidikan Non Formal dalam Sistem Pendidikan Nasional
- Untuk mengetahui Peran Pendidikan Non Formal dalam Pembangunan Bangsa
- Untuk mengetahui Memenuhi Salah satu Tugas Mata Kuliah Teknik Manajemen Pendidikan Non Formal

### **B. Materi**

#### **1. Konsep Dasar Lembaga Pendidikan Nonformal**

##### **a. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan (*education*) secara semantik berasal dari bahasa Yunani *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Pedagogos* adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para *paedagogos*. Istilah ini berasal dari kata *paedos* yang berarti anak, dan *agogos* yang berarti saya membimbing atau memimpin.

Menurut Langeveld (1971: 5) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datang dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem



Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**b. Pengertian Pendidikan Non Formal**

Definisi pendidikan nonformal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Sudjana (2010:13) Pendidikan non formal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun tujuh puluhan. Iatilah-istilah pendidikan yang berkembang di tingkat internasional mula saat itu adalah: pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), pendidikan pembaharuan (*recurrent education*), pendidikan abadi (*permanent education*), pendidikan informal (*informal education*), pendidikan masyarakat (*community education*), pendidikan perluasan (*extention education*), pendidikan massa (*mass education*), pendidikan sosial (*social education*), pendidikan orang dewasa (*adult education*), dan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*).

**c. Konsep Pendidikan Non Formal**

Pendidikan nonformal merupakan konsep dalam studi kependidikan. Kapal (1964) mengemukakan bahwa “ *A concept is a construct* (konsep adalah sebuah bentuk). Pengertian lebih luas ialah

*“Concepts are mental images we use as summary devices for bringing together observations and expriensces that seem to have something in common”* (konsep adalah citra mental yang digunakan sebagai alat untuk memudahkan pengamatan dan pengalaman yang memiliki kesamaan) (Babbie, 1986: 1 : 114). Menurut Turner (1985) mengemukakan pembentukan konsep sebagai berikut: Konsep di bentuk dengan menghubungkan berbagai fakta, benda, atau peristiwa yang memiliki keasamaan ciri yang kemudian di beri nama tersendiri. Sebagai contoh, nama “buah” ialah konsep yang konkrit karena nama ini di tarik dari hasil observasi terhadap benda (buah-buahan) tertentu seperti jeruk, nanas, rambutan yang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu bundar, harum, segar rasanya, dan keluar dari pohon. Adapun “keselamatan” merupakan konsep yang abstrak karena di bentuk dari rangkaian peristiwa yang berkaitan dan menunjukkan ciri-ciri perbuatan yang selamat seperti mengemudi kendaraan dengan hati-har, menggunakan perkakakas dengan benar, dan memiliki tabung pemada api untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran. (Sudjana. 2010:14)

**d. Pengertian Lembaga Pendidikan Nonformal**

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan non formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong perkembangan pendidikan nonformal cukup banyak, diantaranya ialah:

1. Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah.

2. Lapangan kerja, khususnya sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.

Adapun program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pendidikan nonformal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dengan kata lain, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pembedayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat
- b. Guru adalah fasilitator yang diperlukan.
- c. Tidak adanya pembatasan usia.
- d. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis.
- e. Waktu pendidikan singkat dan padat materi.
- f. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah.
- g. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

Sedangkan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal antara lain;

- a. Kelompok bermain (KB)
- b. Taman penitipan anak (TPA)
- c. Lembaga khusus

- d. Sanggar
- e. Lembaga pelatihan
- f. Kelompok belajar
- g. Pusat kegiatan belajar masyarakat
- h. Majelis taklim
- i. Lembaga ketrampilan dan pelatihan

**e. Ciri-ciri Pendidikan Nonformal**

Sanafiah Faisal dalam Gatot Harikin (2010) mengemukakan bahwa ciri-ciri pendidikan nonformal sebagai berikut : “Paket pendidikan yang dilaksanakan berjangka pendek; setiap program pendidikan merupakan suatu paket yang spesifik dan biasanya lahir dari kebutuhan yang sangat diperlukan; persyaratan enromennya sangat fleksibel, baik dalam usia maupun tingkat kemampuan; persyaratan unsur-unsur pengelolaannya jauh lebih fleksibel; skuesnsi materi pelajaran atau latihannya relatif lebih luwes; tidak berjenjang secara kronologis (walaupun terdapat tingkatan-tingkatan, misalnya tingkat dasar, menengah, dan tinggi, hal itu juga tidak seketat perjenjangan pada sistem persekolahan); serta perolehan dan keberartian nilai kredensialnya tidak seberapa tersandarkan.”

Berdasarkan ciri-ciri pendidikan nonformal diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal memiliki ciri yang fleksibel karena dapat diselenggarakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

**f. Fungsi Pendidikan Nonformal**

Fungsi lembaga pendidikan nonformal menurut UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 26 adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pada ayat ke 5, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### **g. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Nonformal**

Tujuan dari diadakannya lembaga pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan yang diatur UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 26 ayat 3. Menurut Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi (2012 : 44) Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan non formal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikan non formal yang bersifat *multi purpose*. Ada tujuan-tujuan pendidikan non formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar (basic education) semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup.

Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.

## **2. Kedudukan Pendidikan Nonformal dalam Sistem Pendidikan Nasional**

### **1. Pendidikan Nonformal sebagai Prantaa dan Kegiatan**

Pendidikan nonformal dapat dibedakan sebagai prantara (institution) dan sebagai kegiatan (setting). Sebagai prantara, pendidikan nonformal merupakan fenomena yang tumbuh di masyarakat bersama prantara lainnya seperti ekonomi, hukum, dan budaya. Secara kelembagaan

pendidikan nonformal menjadi wahana atau mekanisme yang mempunyai struktur kelembagaan, peraturan, tugas, dan tata kerja. Di Indonesia struktur kelembagaan pendidikan ini di miliki oleh instansi-instansi pemerintah dan berbagai lembaga swasta yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan. Di lingkungan instansi pemerintah, yang di beri tanggung jawab untuk membina pendidikan ialah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Instansi-instansi lain, baik lembaga departemen maupun lembaga nondepartemen. Memiliki badan atau pusat yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan. Kelembagaan ini di dukung oleh keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 dan Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen. Berbagai instansi pemerintah menyelenggarakan program pendidikan formal dan/ atau pendidikan nonformal.

Sebagai kegiatan (*setting*), pendidikan nonformal menyangkut hasil dan proses kegiatan. Yang pertama, hasil kegiatan, menggambarkan jumlah dan mutu lulusan program pendidikan. Jumlah lulusan merupakan kuantitas manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Untuk lulusan adalah tingkat kemampuan dan perilaku para lulusan yang di tampilkan oleh seorang atau kelompok orang dalam kehidupan di masyarakat dan lingkungan kerja. Yang kedua, proses kegiatan, menunjukkan upaya yang di sengaja, terorganisasi dan sistematis sehingga terjadi interaksi edukasi antara pihak pendidik dan peserta didik untuk mencapai hasil yaitu mutu lulusan yang di harapkan secara lebih luas, pendidikan sebagai prantara dan sebagai kegiatan itu merupakan penjabaran sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan mengandung arti sebagai suatu jaringan atau organism yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai tujuan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen, dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan. Suatu sistem dapat

merupakan bagian dari system yang lebih besar, yang disebut supra system, dan di dalam suatu system terdapat system-sistem lain sebagian dari system yang dinamai subsistem. Suatu system akan mempunyai kaitan erat dengan system-sistem lainnya yang terdapat dalam supra system.

## **2. Kaitan antara Sistem Pendidikan dengan Supra Sistem Pembangunan**

Pembangunan Nasional, sebagaimana tertuang dalam GBHN adalah adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional sebagai supra system meliputi berbagai system yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra system yaitu tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan nasional, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 dan Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan Nasional, sebagai system dalam supra system pengembangan nasional, menurut GBHN (1989) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, memiliki semangat kebangsaan, percaya pada diri sendiri, bersikap dan perilaku inovatif dan kreatif, mampu membangun dirinya sendiri, dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

### **3. Sub-sub Sistem Pendidikan Nasional**

Sistem pendidikan nasional terdiri atas tiga subsistem yaitu subsistem pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Setiap subsistem memiliki kedudukan yang sama dalam system pendidikan nasional.

Pendidikan formal menurut Undang-undang system pendidikan nasional, merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan formal mulai berjenjang sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, memiliki aturan khusus dan seragam untuk setiap jenjang, bertingkat, mempunyai persyaratan yang ketat, dan pada umumnya berorientasi akademik.

Pendidikan nonformal, menurut The South East Asian Ministry of Education Organization (*SEAMEO, 1971*), adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, di selenggarakan di luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. Tujuannya ialah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok untuk berperan serta secara efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, masyarakat, dan bahkan negaranya. Satuan pendidikan nonformal meliputi kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Ke dalam satuan pendidikan itu termasuk antara lain panti latihan, pusat magang, pusat penyuluhan, gerakan pramuka, kelompok bermain, taman anak, sanggar padepokan, padepokan, majlis taslim, pesantren, dan kegiatan pendidikan melalui media massa yang di selenggarakan oleh lembaga dan masyarakat.



#### **4. Cakupan Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional mencakup pula bentuk-bentuk pendidikan lainnya sepanjang pendidikan tersebut diselenggarakan di luar jalur (subsistem) pendidikan formal yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat diperoleh dalam jalur pendidikan formal. Cakupan atau lingkup pendidikan tersebut yang dikemukakan disini antara lain pendidikan massam, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan perluasan.

##### **a. Pendidikan Massa**

Pendidikan massa (Mass Education) adalah kesempatan pendidikan yang berkaitan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu masyarakat sehingga warganya memiliki kecakapan membaca, menulis, berhitung dan bepengetahuna umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara yang bertanggung jawab.

##### **b. Pendidikan Orang Dewasa**

Pendidikan orang dewasa merupakan proses pendidikan yang terorganisasi dengan berbagai bahan belajar, tingkatan, dan metod, baik bersifat resmi maupun tidak, meliputi upaya kelanjutan atau perbaikan pendidikan yang diperoleh dari sekolah, akademi, universitas, atau magang. Pendidikan tersebut diperuntukan bagi orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan profesi yang telah dimiliki, memperoleh cara-cara baru, serta mengubah sikap dan perilaku orang dewasa. Tujuan pendidikan ini ialah supaya orang-orang dewasa mampu mengembangkan diri secara optimal dan berpartisipasi aktif, malah menjadi pelopor di masyarakat, dalam

kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dan terus berubah dan berkembang.

### **3. Peran Pendidikan Non Formal dalam Pembangunan Bangsa**

Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan non formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana mengemukakan peran pendidikan non formal adalah sebagai "pelengkap, penambah, dan pengganti" dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah

Pendidikan non formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non formal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program-program pendidikan non formal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.

b. Sebagai penambah pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada:

1. Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah.
2. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh.
3. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.

c. Sebagai pengganti pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya. (D. Sudjana.. 2001 : 107)

## Kesimpulan

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal merupakan konsep dalam studi kependidikan. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal dapat dibedakan sebagai prantara (institution) dan sebagai kegiatan (setting). Sebagai prantara, pendidikan nonformal merupakan fenomena yang tumbuh di masyarakat bersama prantara lainnya seperti ekonomi, hukum, dan budaya. Peran Pendidikan Non Formal dalam Pembangunan Bangsa yaitu Sebagai pelengkap pendidikan sekolah, Sebagai penambah pendidikan sekolah, Sebagai pengganti pendidikan sekolah.

## Soal dan Latihan

1. setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah adalah pengertian...
  - a. Pendidikan
  - b. Pendidikan nonformal
  - c. Konsep pendidikan
  - d. Lembaga pendidikan
  - e. Pendidikan Informal
2. pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” adalah pengertian pendidikan menurut...
  - a. Djuanda
  - b. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3
  - c. Undang-undang system pendidikan nasional nomor 12 tahun 2004
  - d. Undang-undang system pendidikan nasional nomor 24 tahun 2005
  - e. Undang-undang system pendidikan nasional nomor 21 tahun 2004
3. Di bawah ini adalah ciri-ciri pendidikan nonformal, kecuali...
  - a. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat
  - b. Guru adalah fasilitator yang diperlukan
  - c. Tidak adanya pembatasan usia
  - d. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis
  - e. Peserta didik adalah tokoh utama

4. Dibawah ini adalah lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, kecuali...
  - a. Kelompok bermain
  - b. Taman penitipan anak (TPA)
  - c. Lembaga khusus
  - d. Sekolah dasar (jwb)
  - e. Sanggar
5. Faktor pendorong perkembangan pendidikan nonformal adalah...
  - a. Mempunyai semangat yang tinggi
  - b. Memiliki keykinan yang kuat
  - c. Tidak pernah menyerah dengan masalah-masalah yang ada
  - d. Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah
  - e. Percaya diri
6. Cakupan atau lingkup pendidikan yang di kemukakan disini antara lain...
  - a. Pendidikan massa
  - b. pendidikan orang dewasa
  - c. pendidikan perluasan
  - d. a,b,c benar
  - e. Semua benar
7. Pendidikan non formal adalah sebagai "pelengkap, penambah, dan pengganti" adalah pengertian...
  - a. Konsep pendidikan nonformal
  - b. Lembaga pendidikan nonformal
  - c. Peran pendidikan nonformal
  - d. Kedudukan nonformal
  - e. Sistem pendidikan nonformal
8. Tujuan dari diadakannya lembaga pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik adalah aturan oleh...
  - a. UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 26 ayat 3
  - b. UU Sisdiknas Tahun 2004 pasal 26 ayat 2

- c. UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 26 ayat 3
  - d. UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 26 ayat 5
  - e. UU Sisdiknas Tahun 2000 pasal 26 ayat 1
9. program-program pendidikan nonformal adalah...
- a. paket A
  - b. paket B
  - c. paket C
  - d. semua salah
  - e. a,b,c benar
10. kesempatan pendidikan yang berkaitan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membntu masyarakat sehingga warganya memiliki kecakapan membaca, menulis, berhitung dan bepengetahuna umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara yang bertanggung jawab adalah pengertian...
- a. Pendidikan dewasa
  - b. Pendidikan massa
  - c. Pendidikan perluasan
  - d. Pendidikan menengah
  - e. Pendidikan nonformal

#### Esay

1. Jelaskan pengertian pendidikan Menurut Langeveld (1971: 5) !
2. Jelaskan pengertin pendidikan nonformal Menurut Sudjana ( 2010 : 13) !
3. Jelaskan Kedudukan Pendidikan Nonformal dalam Sistem Pendidikan Nasional !
4. Sebutkan ciri-ciri pendidikan nonformal !
5. Sebutkan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal !

## Jawaban

- |      |       |
|------|-------|
| 1) A | 6) D  |
| 2) B | 7) C  |
| 3) E | 8) A  |
| 4) A | 9) E  |
| 5) D | 10) B |

1. pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.
2. Pendidikan non formal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun tujuh puluhan. Istilah-istilah pendidikan yang berkembang di tingkat internasional mula saat itu adalah: pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), pendidikan pembaharuan (*recurrent education*), pendidikan abadi (*permanent education*), pendidikan informal (*informal education*), pendidikan masyarakat (*community education*), pendidikan perluasan (*extention education*), pendidikan massa (*mass education*), pendidikan sosial (*social education*), pendidikan orang dewasa (*adult eduction*), dan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*).
3. Pendidikan Nonformal sebagai Prantaa dan Kegiatan

Pendidikan nonformal dapat dibedakan sebagai prantara (institution) dan sebagai kegiatan (setting). Sebagai prantara, pendidikan nonformal merupakan fenomena yang tumbuh di masyarakat bersama prantara lainnya seperti ekonomi, hukum, dan budaya. Secara kelembagaan pendidikan nonformal menjadi wahana atau mekanisme yang mempunyai struktur kelembagaan, peraturan, tugas, dan tata kerja. Di Indonesia struktur kelembagaan pendidikan ini di miliki oleh intansi-instansi pemerintah dan berbagai lembaga swasta yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan. Di lingkungan intansi pemerintah, yang di beri tanggung jawab untuk membina pendidikan ialah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Intansi-intansi lain, baik lembaga departemen maupun lembaga nondepartemen. Memiliki badan atau pusat yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan. Kelembagaan ini di dukung oleh keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 dan Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen. Berbagai instansi pemerintah menyelenggarakan program pendidikan formal dan/ atau pendidikan nonformal.

4. Ciri-cirinya yaitu:
  - a. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat
  - b. Guru adalah fasilitator yang diperlukan.
  - c. Tidak adanya pembatasan usia.
  - d. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis.
  - e. Waktu pendidikan singkat dan padat materi.
  - f. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah.
  - g. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.
5. Lembaga penyelenggaraan nonformal yaitu:
  - a. Kelompok bermain (KB)
  - b. Taman penitipan anak (TPA)
  - c. Lembaga khusus
  - d. Sanggar
  - e. Lembaga pelatihan
  - f. Kelompok belajar
  - g. Pusat kegiatan belajar masyarakat
  - h. Majelis taklim
  - i. Lembaga ketrampilan dan pelatihan

## DAFTAR PUSTAKA

- Sudjana. 2001. *Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung serta Asas.*, (Bandung: Falah Production 2001) hal 107
- Sudjana. 2001. *Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung serta Asas.*, (Bandung: Falah Production 2001) hal 14
- Langeveld. *Beknopte Theoretis the Paedagogiek.*( Jakarta: Simandjuntak 1971) hal 5
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
- Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 pasal 26
- Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka. 2012) hal 44
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (*SEAMEO, 1971*)

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL**

Tujuan Perkuliahan : Mengenalkan karakteristik lembaga pendidikan nonformal  
Materi : Karakteristik lembaga pendidikan nonformal dari segi tujuan, waktu, warga belajar, strategi, sarana dan evaluasi

#### **A. Pengertian Pendidikan Nonformal**

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Pemerintah Republik Indonesia : 2003)

Pengertian pendidikan menurut Syah (1995:71) ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan tetapi diperluas ruang lingkungannya sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan pribadi sosial yang memuaskan.

Menurut Joesoef (1992:52) pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan Negaranya.

Definisi klasik mengenai pendidikan nonformal dikemukakan oleh Coombs dan Ahmed dalam Yoyon dan Entoh (2016 : 18) bahwa pendidikan nonformal (PNF) adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis, di luar sistem

persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.

#### **A. Pengertian Tiga Jenis Pendidikan**

Dalam modul ini kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan nonformal. Namun untuk bisa mengetahui ciri khas dan karakteristik pendidikan nonformal tersebut kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian tiga jenis pendidikan yang saat ini di akui yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal. Karena jika berbicara secara garis besar masih ada kriteria yang lebih umum sehingga penggolongan yang telah dibicarakan benar-benar termasuk kedalam pendidikan nonformal. Kriteria tersebut berkaitan dengan pengertian (definisi) pendidikan sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara pendidikan formal (termasuk pula di dalamnya pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal dan pendidikan yang program-programnya bersifat formal). sehingga dengan hal tersebut seorang ahli yang bernama Coombs dalam sudjana (2010:21) membedakan pengertian ketiga jenis pendidikan itu sebagai berikut :

1. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.
2. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan
3. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja

dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya.

Ketiga pengertian tersebut diatas dapat digunakan untuk membedakan program pendidikan yang termasuk kedalam setiap jalur pendidikan. Sebagai untuk menganalisis berbagai program pendidikan maka ketiga batasan pendidikan tadi perlu di perjelas lagi dengan menggunakan kriteria yang dapat membedakan antara pendidikan nonformal dan pendidikan informal dan pendidikan formal.perbedaan dari ketiganya dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendidikan formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, dilaksanakan dilingkungan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik.
3. Pendidikan Informal Tidak diarahkan untuk melayani kebutuhan belajar yang di organisasi. kegiatan belajar yang kedua ini lebih umum dan berjalan dengan sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga, serta melalui media massa, tempat bermain dan lain sebagainya.

## **B. Karakteristik Program Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal**

Perbedaan Karakteristik Program-program Sudjana, (2010:28-30)

PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL	PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL
<p><b>1. TUJUAN</b></p> <p>a. <i>Jangka panjang dan umum</i> Bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan umum untuk kehidupan-kehidupan masa depan</p> <p>b. <i>Orientasi pada pemilikan Ijazah</i> Hasil belajar akhir ditandai dengan pengesahan kemampuan melalui</p>	<p>a. <i>Jangka pendek dan khusus</i> Bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu yang fungsional dalam kehidupan mas kini dan masa depan.</p> <p>b. <i>Kurang Menekankan</i> Pentingnya Ijazah hasil belajar, berijazah atau tidak, dapat</p>

<p>ijazah. Ijazah di perlukan untuk memperoleh pekerjaan, kedudukan, dan atau melanjutkan ke studi jenjang lebih tinggi. Ganjaran atas keberhasilan terutama diperoleh pada akhir program.</p>	<p>diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Ganjaran diperoleh selama proses dan akhir program terwujud hasil, produk, pendapatan, keterampilan.</p>
<p><b>2. WAKTU</b></p> <p><i>a. Relatif lama</i> Jarang selesai dalam waktu kurang dari setahun, sering melampaui batas waktu ditetapkan. Kadang-kadang lebih dari sepuluh tahun. Satu jenjang menjadi syarat untuk mengikuti jenjang yang lebih tinggi</p> <p><i>b. Berorientasi ke masa depan</i> Menyiapkan untuk masa depan kehidupan peserta didik.</p> <p><i>c. Menggunakan waktu penuh dan terus menerus</i> Karena penggunaan waktu yang terus menerus maka kecil kemungkinan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang paralel atau pekerjaan</p>	<p><i>a. Relatif singkat</i> Jarang lebih dari satu tahun, pada umumnya kurang dari setahun. Lama penyelenggaraan program tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Persyaratan untuk mengikuti program pendidikan ialah kebutuhan, minat dan kesempatan.</p> <p><i>b. Menekanan masa sekarang</i> Memusatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan teras peserta didik dalam meningkatkan kemampuan sosial ekonominya yang berguna bagi masa depan kehidupannya meningkatkan kemampuan sosial ekonominya.</p> <p><i>c. Menggunakan waktu tidak terus menerus</i> Waktu di tetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar</p>

rumit.	sambil bekerja atau berusaha.
<p><b>3. ISI PROGRAM</b></p> <p><i>a. Kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan</i></p> <p>Lembaga di tingkat nasional menyusun kurikulum berupa paket dan dikenakan kepada semua peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang</p> <p><i>b. bersifat akademis</i></p> <p>Kurikulum lebih memberi bobot pada ranah kognisi dan teoritis, sedangkan ranah afeksi dan psikomotorik kurang mendapat perhatian utama.</p> <p><i>c. Seleksi penerimaan peserta didik dilakukan dengan persyaratan ketat</i></p> <p>Persyaratan masuk, terutama untuk jenjang yang lebih tinggi, dilakukan melalui seleksi yang ketat (ujian) guna mengetahui kemampuan yang diperlukan.</p>	<p><i>a. Kurikulum lebih berpusat pada kepentingan kepentingan peserta didik</i></p> <p>Kurikulum bermacam ragam sesuai dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan potensi daerahnya melalui pendidikan.</p> <p><i>b. Mengutamakan aplikasi</i></p> <p>Kurikulum lebih menekankan pada pemilihan keterampilan fungsional yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya.</p> <p><i>c. Persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik</i></p> <p>Karena program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan potensi peserta didik maka kualifikasi pendidikan sekolah sering tidak menjadi persyaratan utama.</p>
<p><b>4. PROSES PEMBELAJARAN</b></p> <p><i>a. Dipusatkan di lingkungan sekolah</i></p> <p>Kegiatan belajar dilakukan di lingkungan sekolah, yang sering dianggap sebagai satu-satunya institusi pendidikan.</p>	<p><i>a. Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga</i></p> <p>Kegiatan belajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan (komunitas, tempat bekerja) atau satuan pendidikan nonformal (sanggar</p>

<p><i>b. Terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat</i></p> <p>Pada waktu belajar di sekolah, peserta didik dipisahkan dari kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Program kegiatan belajar terpisah dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.</p> <p><i>c. Struktur program yang ketat</i></p> <p>Program pembelajaran disusun secara ketat. Waktu, kegiatan dan usia peserta didik di tetapkan secara seragam.</p> <p><i>d. Berpusat pada pendidik</i></p> <p>Kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh pendidik (guru) yang diberi wewenang pada jenjang pendidikan tertentu. kegiatan mengajar lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan belajar.</p> <p><i>e. Pengerahan daya dukung secara maksimal</i></p> <p>Menggunakan tenaga dan sarana yang relatif mahal. Sumber-sumber pendukung pada umumnya</p>	<p>kegiatan belajar, pusat latihan, dsb).</p> <p><i>b. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat</i></p> <p>Pada waktu mengikuti program pendidikan, peserta didik berkomunikasi dengan dunia kehidupan atau pekerjaannya. Lingkungan dihubungkan secara secara fungsional dengan kegiatan belajar</p> <p><i>c. Struktur program yang luwes</i></p> <p>Jenis dan urutan program kegiatan belajar bervariasi. Pengembangan program dapat dilakukan sewaktu program sedang berjalan.</p> <p><i>d. Berpusat pada peserta didik</i></p> <p>Kegiatan pembelajarn dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan narasumber. Peserta didik dapat menjadi sumber belajar. Lebih menekankan kegiatan membelajarkan dibandingkan mengajar.</p> <p><i>e. Penghematan sumber-sumber yang tersedia</i></p> <p>Menfaatkan tenaga dan sarana yang terdapat di masyarakat dan lingkungan kerja dalam rangka</p>
--	---



didatangkan dari luar peserta didik.	efisiensi.
<p><b>5. PENGENDALIAN</b></p> <p>a Dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi pengawasan dan keberhasilan program dikendalikan oleh pihak dari tingkat yang lebih tinggi dan di terapkan seara seragam.</p> <p>b Pendekatan berdasarkan kekuasaan Hubungan fungsional antara pendidik dengan peserta didik menggunakan pendekatan kekuasaan perbedaan didasarkan atas peranan dan kedudukan.</p>	<p>a Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, pengendalian tidak terpusat. koordinasi dilakukan antara lembaga-lembaga terkait. Otonomi pada tingkat program dan daerah dengan menekankan inisiatif dan partisipasi masyarakat.</p> <p>b Pendekatan demokratis Hubungan anatara pendidik dengan peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian. Pembinaan program dilakukan secara demokratik.</p>

**Kesimpulan :**

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, dilaksanakan dilingkungan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik.

Dengan adanya jalur pendidikan nonformal ini diharapkan bahwa setiap masyarakat dapat memperoleh pendidikan dengan layak walaupun tidak dengan jalur yang formal, juga dengan adanya penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat membantu setiap elemen masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya. Dengan demikian adanya pendidikan nonformal sebagai pendukung dan penyokong untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat dicapai dengan baik dan saling berkesinambungan, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan zaman.

### C. Soal dan Jawaban

Pilihan Ganda :

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan formal menurut Coombs ?
  - a. Kegiatan sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan setaraf dengannya
  - b. Proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari dan pengaruh lingkungan
  - c. Setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan tertentu
  - d. Pendidikan dalam keluarga yang berlangsung sejak anak dilahirkan
  
2. Apa yang dimaksud pendidikan nonformal menurut Syah Muhibin?
  - a. Kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan setaraf dengannya
  - b. Proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari dan pengaruh lingkungan
  - c. Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan tetapi diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan pribadi sosial yang memuaskan.
  - d. Pendidikan dalam keluarga yang berlangsung sejak anak dilahirkan
  
3. Sebutkan salah satu tujuan dari karakteristik program pendidikan nonformal ?
  - a. Jangka panjang dan umum
  - b. Jangka pendek dan khusus
  - c. Jangka panjang dan khusus

- d. Jangka pendek dan umum
4. Sebutkan perbedaan waktu dalam program pendidikan formal dan nonformal ?
    - a. Pendidikan formal relatif lama dan nonformal relatif singkat
    - b. Pendidikan formal relatif singkat dan nonformal relatif lama
    - c. Pendidikan formal berorientasi pada masa sekarang dan nonformal berorientasi pada masa depan
    - d. Pendidikan formal menggunakan waktu tidak terus menerus dan nonformal menggunakan waktu penuh dan terus menerus
  5. Sebutkan proses pembelajaran program pendidikan nonformal ?
    - a. Dipusatkan dilingkungan sekolah
    - b. Terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat
    - c. Struktur program yang ketat
    - d. Dipusatkan dilingkungan masyarakat dan lembaga
  6. Dipusatkan dengan kehidupan masyarakat dan lembaga serta struktur programnya yang luwes termasuk karakteristik pendidikan nonformal dalam segi ?
    - a. Tujuan
    - b. Waktu
    - c. Proses pembelajaran
    - d. Isi program
  7. Kurikulum lebih berpusat pada kepentingan peserta didik termasuk karakteristik pendidikan nonformal dalam segi ?
    - a. Tujuan
    - b. Waktu
    - c. Proses pembelajaran
    - d. Isi program
  8. Sebutkan contoh penyelenggaraan program pendidikan nonformal ?
    - a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS)
    - b. Pendidikan Keaksaraan dan kelompok bermain & Taman Penitipan Anak

- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan keaksaraan
  - d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS)
9. Pendidikan kesetaraan termasuk ke dalam program pendidikan ?
- a. Program pendidikan kepemudaan
  - b. Program pendidikan pemberdayaan perempuan
  - c. Program pendidikan paket A, paket B dan paket C
  - d. Program pendidikan anak usia dini
10. Program paket C setara dengan pendidikan ?
- a. Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan
  - b. Sekolah Dasar
  - c. Sekolah Menengah Pertama
  - d. Madrasah Tsanawiyah

**Essay :**

1. Jelaskan pengertian dari pendidikan formal dan nonformal ?
2. Sebutkan perbedaan pendidikan formal dan nonformal dari segi waktu ?
3. Bagaimana proses pembelajaran dalam pendidikan nonformal ?
4. Sebutkan karakteristik pendidikan nonformal dari segi tujuan ?
5. Sebutkan penyelenggaraan program pendidikan nonformal ?

**Jawaban :**

Pilihan Ganda :

- |      |       |
|------|-------|
| 1. A | 6. C  |
| 2. C | 7. D  |
| 3. B | 8. B  |
| 4. A | 9. C  |
| 5. D | 10. A |

**Essay :**

1. Pendidikan formal adalah Kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan setaraf dengannya sedangkan pendidikan non formal adalah Setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan tertentu.
2. Pendidikan formal dari segi waktu : relatif lama, berorientasi ke masa depan, dan menggunakan waktu penuh dan terus menerus.  
Pendidikan nonformal : relatif singkat, menekankan masa sekarang, menggunakan waktu tidak terus menerus.
3. Proses pembelajaran pendidikan nonformal dipusatkan dilingkungan masyarakat dan lembaga artinya kegiatan belajar dapat dilakukan diberbagai lingkungan (komunitas, tempat bekerja) atau satuan pendidikan nonformal (sanggar kegiatan belajar, pusat latihan).
4. Pendidikan nonformal dari segi tujuan :
  - jangka pendek dan khusus bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu yang fungsional dalam kehidupan masa kini dan masa depan.
  - Kurang menekankan pada pemilikan ijazah artinya pentingnya ijazah hasil belajar, berijazah atau tidak, dapat diterapkan langsung dalam kehidupan dilingkungan pekerjaan atau di masyarakat.

5. Penyelenggaraan program pendidikan nonformal meliputi : pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini (contohnya : Kelompok bermain, Taman penitipan anak), pendidikan kepemudaan (organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi kepanduan/kepramukaan, organisasi palang merah, organisasi pecinta alam dan lingkungan dan organisasi lain yang sejenisnya), pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan ( program paket A, paket B dan paket C).

## DAFTAR PUSTAKA

- Joesoef, Soelaiman, 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Non Formal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhibbin, Syah, 1995. Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sudjana, 2010. *Pendidikan Non Formal*. Bandung : Falah Production.
- Suryono Yoyon, Entoh Tohani. 2016. *Inovasi Pendidikan Non Formal*. Yogyakarta : Graha Cendekia



**BAB III**  
**RAGAM JENIS DAN BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**NONFORMAL (KURSUS DAN MAGANG)**

- I. Tujuan Perkuliahan : Mengenalkan ragam bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal
- II. Materi : Kursus dan Magang

**A. Konsep Kursus**

1. Pengertian Kursus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir keempat menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga kursus sebagai lembaga pendidikan luar sekolah (PLS) yang diprakarsai, dibiayai, dan diselenggarakan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok maupun komunitas yang melayani masyarakat dalam belajar guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan (skill) fungsional, dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan, berusaha mandiri, ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Triyana, 2012:14)

Dapat disimpulkan bahwa kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

## 2. Sistem Pembelajaran Kursus

Menurut Komar (2006:203-204) salah satu pengertian sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem kegiatan pendidikan pada satuan kursus terdiri atas input, proses dan output. Input satuan kursus terbagi atas: input lingkungan (environmental input), input instrumen (instrumental input), input bahan mentah (raw input), dan input lain (other input).

Di antara faktor yang merupakan input lingkungan adalah keadaan alam sekitar, lingkungan, keluarga, dan masyarakat, sosial ekonomi, biaya, sarana dan kebiasaan/tradisi. Input instrumen satuan kursus terdiri dari tujuan, kurikulum, tenaga kependidikan, pembiayaan, sumber daya dan media belajar, fasilitas dan kondisi pengelola program. Input bahan mentah terdiri atas karakteristik internal dan eksternal warga belajar. Diantaranya menyangkut pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kesiapan, motivasi, sosial ekonomi, biaya, sarana, dan kebiasaan belajar. Input lain merupakan faktor pendukung terhadap pengaktualisasian kemampuan yang telah diperoleh oleh warga belajar selama pendidikan berlangsung, seperti lapangan pekerjaan, permodalan, pemasaran, fasilitas informasi, kursus lanjutan, dan ikatan lulusan.

Proses (throughput) yang terjadi di dalam satuan kursus merupakan fungsi dari peran serta dan bekerjanya faktor input (input lingkungan, instrumen, bahan mentah dan input lain). Selama proses berlangsung, bagi input bahan mentah akan terjadi pengentasan dalam bentuk pembelajaran, bimbingan, latihan dan interaksi lainnya yang memungkinkan terwujudnya perubahan pada pengetahuan, sikap, keterampilan dan kebiasaan warga belajar.

Output satuan kursus berkenaan dengan produk dan dampak. Produk berhubungan dengan segala hal yang dihasilkan oleh kursus baik berkualitas maupun kuantitasnya serta barang dan jasa. Adapun dampak (outcome) berhubungan dengan konsekuensi ikatan yang melekat pada warga belajar setelah mengikuti pendidikan, seperti perubahan taraf hidup, penyebarluasan bahan belajar, serta peningkatan partisipasi sosial dalam pembangunan.

### 3. Pengelolaan Pembelajaran Kursus

#### a. Kemitraan

Jaringan kemitraan menurut Kamil (2010:166) adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Menurut Kartasasmita (1996) dalam Banowati (2014:33) dalam upaya mengembangkan dunia usaha, terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara lain: 1) kemitraan antar skala usaha, 2) kemitraan usaha antar daerah atau antar kawasan, 3) kemitraan usaha antar sektor, dan 4) kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek.

#### b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Secara otimologis (arti kata) Daryanto (2008:51) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sedangkan, sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan misalnya ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Sedangkan, menurut Keputusan Menteri P dan K No.079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu: 1) bangunan dan perabot sekolah, 2) alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium, dan 3)

media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

#### 4. Ragam jenis dan bentuk lembaga kursus

Dalam rangka Pemerataan dan Perluasan Akses, dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup, untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat baik pada spektrum pedesaan, perkotaan, nasional, dan internasional, yaitu: 1) Kursus Wirausaha Kota (KWK), 2) Kursus Wirausaha Desa (KWD), 3) Kursus Para Profesi (KPP), dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama SMK/Politeknik/BLK /Perguruan Tinggi.

##### a. Program Kursus Wirausaha Kota (KWK)

Kursus Wirausaha Kota (KWK) adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat perkotaan agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan atau berwirausaha dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program KWK adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan/atau usaha yang ada di perkotaan, antara lain: a) Menjahit, b) Tata Kecantikan Kulit/Rambut, c) Tata Rias Pengantin, d) Jasa Boga, e) Otomotif, f) Elektronika, g) SPA, h) Komputer, i) Pariwisata (perhotelan), j) Jenis keterampilan bidang jasa lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja dan usaha di perkotaan

##### b. Program Kursus Wirausaha Desa (KWD)

KWD adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat pedesaan agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuh kembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program KWD adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan/atau wirausaha yang ada di pedesaan. Jenis keterampilan KWD diarahkan pada sektor produksi yang memberdayakan sumber potensi sekitarnya. Prioritas jenis keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dan/atau usaha di pedesaan, antara lain: a) Pertanian, b) Perkebunan, c) Perikanan darat dan laut, d) Kehutanan, e) Peternakan, f) Pertukangan, g) Keterampilan lain yang dianggap laku di pasar sekitar (marketable).

c. Program Kursus Para Profesi (KPP)

Kursus Para Profesi (KPP) adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program KPP adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan pesanan tenaga kerja (job order) yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara KPP. Prioritas Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP, antara lain : a) Otomotif, b) Elektronika, c) Spa, d) Komputer, e) Akupunktur, f) PLRT plus, g) Garmen/menjahit, h) Baby Sitter, i) Care Giver, j) House Keeping, k) Pariwisata (perhotelan), l) Jenis keterampilan lainnya sesuai job order.

5. Pendaftara dan Perizinan

Mendirikan lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat baik perorangan, kelompok agar mendapat pengakuan dari Dikmas tingkat kecamatan, kotamadya/ kabupaten harus mendaftarkan diri/ lembaga. Selanjutnya mengurus perizinan agar mendapat persetujuan wewenang resmi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka menunjang program pendidikan. Pemberian izin tidak mutak, tetapi terikat dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

a. Pentahapan kriteria perizinan :

- 1) Tahap pertama: tercatat, yaitu suatu tahap lembaga PLS telah dicatat oleh penilik pendidikan masyarakat setempat.
- 2) Tahap kedua: terdaftar, yaitu suatu tahap lembaga PLS telah terdaftar pada kepala seksi Dikmas dengan petunjuk penilik Dikmas. Status terdaftar ini merupakan masa percobaan dan berlaku paling lama 6 bulan.
- 3) Tahap ketiga: izin penyelenggara kursus PLS. Izin dapat diberikan kepada penyelenggara/ pengelola kursus yang telah memenuhi persyaratan.

b. Pentahapan izin ada tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap C: disebut tahap swadaya, yang statusnya dalam masa pembinaan. Pemberian izin tersebut untuk melegalisasi kegiatan penyelenggaraan. Tahap ini maksimum 1 tahun.
- 2) Tahap B: disebut tahap swakarya, statusnya dalam masa pengembangan. Pemberian izin dilakukan sebelum tahap swadaya berakhir, sedang pelaksanaan pendidikan berjalan lancar dan baik. Masa berlaku izin penyelenggaraan pada tahap ini maksimum 3 tahun.
- 3) Tahap A: disebut tahap swasembada, statusnya dalam masa pemantapan. Pemberian izin pada tahap ini apabila kursus telah melaksanakan program pendidikannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Masa berlaku masa penyelenggaraan pada tahap ini maksimum 5 tahun.

c. Prosedur Pengajuan Permohonan Izin

Maksud diadakan pendaftaran dan perizinan adalah memberikan wewenang kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan/ mendirikan kursus Diklusemas sesuai dengan jenisnya dalam rangka menunjang sukses program pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan mendikbud nomor 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981. Ada 3 macam pendaftaran dan perizinan, yaitu terdaftar, izin dan perpanjangan.

1) Terdaftar

Untuk mendapatkan status terdaftar pimpinan kursus kan kursusnya kepada kantor Dekdikbud Kabupaten/Kodya dalam hal ini Kepala seksi Dikmas dengan petunjuk Penilik Dikmas, tembusannya dikirim kepada Kantor Dekdikbud Kecamatan. Penilik memberikan petunjuk secukupnya tentang pendaftaran kursus serta cara pengisian formulir pendaftaran. Penilik Dikmas atas nama Kepala Kantor Depdikbud kecamatan melaporkan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kodya, dalam hal ini Kepala Seksi Dikmas, ssetelah diadakan pengecekan/peninjauan.

Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kodya mengeluarkan bukti pendafatran kepada penyelenggara kursus yang tebusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi dan Direktur Pendidikan Masyarakat.

2) Izin

Setelah diteliti dan telah memenuhi persyaratan Kanwil Depdikbud Propinsi mengeluarkan surat keputusan izin penyelenggarakan kursus Diklusemas dan piagam. Surat Keputusan dan Piagam untuk kursus Diklusemas dikirimkan kepada penyelenggara kursus melalui Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kodya dan Kantor Depdikbud Kecamatan baik bidang

Dikmas dan seksi Dikmas maupun penilik Dikmas harus mencatatnya dalam buku registrasi /pendaftaran.

### 3) Prosedur pengajuan perpanjangan

Pada prinsipnya prosedur pengajuan perpanjangan izin sama dengan prosedur pengajuan perizinan, mengisi formulir perpanjangan izin yang sudah ditentukan dan melampirkan fotokopi surat keputusan izin yang lama serta laporan kegiatan selama periode 1 tahun yang telah berlangsung. Satu bulan sebelum waktu masa perizinan, penyelenggara kursus sudah harus melapor kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kodya, dalam hal ini Kepala Seksi Dikmas. Bila masa perizinan telah berakhir dan penyelenggara kursus tidak melapor, maka Kepala Seksi Dikmas membuat surat pemberitahuan. Bila setelah 3 bulan sejak berakhirnya surat izin penyelenggaraan kursus yang bersangkutan tidak mengurus sebagaimana mestinya, maka izin penyelenggaraan kursus tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan yang bersangkutan harus mengurus izin baru.

## **B. Konsep Magang**

### 1. Pengertian Magang

Magang merupakan proses belajar yang dilakukan anak di tempat tertentu baik itu didampingi oleh instruktur, ataupun tanpa didampingi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman kepada anak tentang proses mengerjakan suatu pekerjaan secara langsung di tempat kerja. Masalah magang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 21 – 30.

Dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di



lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Beberapa pengertian yang digunakan dalam juknis program magang peserta didik kursus dan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a. Program magang adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan belajar dan bekerja secara langsung (learning by doing) yang dilaksanakan secara terpadu antara proses pembelajaran di LKP dengan praktik bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur di perusahaan, dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan di DUDI
- b. Peserta magang peserta didik adalah warga masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu namun belum bekerja atau peserta didik regular pada LKP yang ingin mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kompetensinya melalui magang di perusahaan/industri.
- c. Penyelenggara program magang adalah LKP atau satuan pendidikan lain yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program magang dan memiliki mitra kerja (DUDI) yang sesuai.
- d. Dunia Usaha dan/atau Dunia Industri (DUDI) adalah perusahaan yang berbadan hukum milik orang perseorangan/persekutuan, milik badan hukum baik swasta maupun negara, atau badan usaha sosial perusahaan yang bergerak di bidang barang/jasa yang bersedia menjadi tempat magang peserta didik.
- e. Perjanjian kerja sama penyelenggara adalah perjanjian antara LKP dengan DUDI yang dibuat secara tertulis yang memuat teknis pelaksanaan penyelenggaraan program magang.

- f. Surat pernyataan adalah bukti kesanggupan peserta didik secara tertulis untuk mengikuti program magang yang memuat ketentuan tentang kewajiban menyelesaikan program magang sampai tuntas.
- g. Akad Kerjasama adalah perjanjian kerjasama tiga pihak antara lembaga penyelenggara program magang, DUDI dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk penyelenggaraan program magang peserta didik. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:3-4)

## 2. Sasaran Program

Sasaran program magang adalah warga masyarakat Indonesia berusia 18-45 tahun yang belum bekerja atau belum berpenghasilan tetap namun memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang keterampilan yang akan dimagangkan. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:4)

## 3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program magang peserta didik kursus dan pelatihan ini adalah :

- a. Meningkatnya kompetensi peserta didik program magang.
- b. Menyalurkan peserta didik magang untuk menjadi karyawan, mitra usaha/plasma atau usaha mandiri.
- c. Memperluas jangkauan layanan kursus dan pelatihan untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil dalam mendukung kegiatan usaha/industri baik barang/jasa. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:5)

## 4. Waktu Pelaksanaan magang

Program magang peserta didik kursus dan pelatihan selama menjalani proses magang pada DUDI dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan dengan mengikuti waktu kerja dari DUDI setempat. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:5)

## 5. Kriteria Peserta Magang

Peserta magang adalah warga masyarakat yang sudah memiliki keterampilan, belum bekerja atau sudah bekerja tapi ingin meningkatkan kompetensinya, peserta didik reguler pada LKP yang ingin mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan/industri, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki minat dan motivasi untuk mengikuti dan bekerja dibidang yang sesuai dengan program magang.
  - b. Memiliki keterampilan yang relevan dengan program magang, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga/instansi terkait.
  - c. Berusia produktif yaitu antara 18 sampai dengan 45 tahun atau sesuai persyaratan DUDI masing-masing.
  - d. Bukan peserta didik program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) atau Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), maupun program bantuan dari institusi (pemerintah/swasta) lainnya di tahun yang sama.
  - e. Membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti dan menandatangani perjanjian program magang. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:6-7)
6. Kriteria Penyelenggara Program Magang

Penyelenggara program pemagangan adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan lain yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menjalin kerjasama dengan DUDI tempat magang akan dilakukan, dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan.
- b. Memiliki SDM yang mampu dan siap melaksanakan program magang.
- c. Memiliki acuan rencana pelaksanaan program magang yang akan dilaksanakan.

- d. Memiliki rencana dan jadwal kegiatan magang yang akan dilaksanakan.
  - e. Memiliki instrumen/perangkat untuk melakukan tes awal/seleksi, proses (monitor/supervisi), dan akhir program magang (uji kompetensi) oleh DUDI.
  - f. Memenuhi persyaratan administratif, yaitu:
    - 1) Mempunyai akta pendirian lembaga yang dibuat oleh notaris dan/atau disahkan Pengadilan Negeri/Kementerian Hukum dan HAM setempat.
    - 2) Memiliki NPWP atas nama lembaga.
    - 3) Memiliki rekening bank atas nama lembaga.
    - 4) Memiliki ijin operasional yang masih berlaku minimal 1 tahun ke depan dan telah beroperasi minimal 3 tahun secara aktif (ada proses pembelajaran) bagi LKP/satuan PNF. Untuk non satuan PNF memiliki surat keputusan dari pimpinan tertinggi institusi yang bersangkutan.
    - 5) Memiliki NILEK/NILEM/NPSN on-line dan berkinerja/terakreditasi.
    - 6) Mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:7-8)
7. Kriteria dan Persyaratan DUDI

Dunia Usaha dan/atau Dunia Industri (DUDI) adalah perusahaan yang berbadan hukum milik orang perseorangan/persekutuan, milik badan hukum baik swasta maupun negara, atau badan usaha sosial yang bersedia menjadi tempat magang peserta didik, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menjadi mitra kerja dari calon penyelenggara program magang, dibuktikan dengan perjanjian kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan.

- b. Memiliki tenaga atau karyawan yang khusus mendampingi pelaksanaan program magang sebagai pembimbing.
- c. Memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan memadai untuk melaksanakan program magang.
- d. Memiliki SOP dalam pelaksanaan proses dan pengendalian sistem kerja produksi di DUDI. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016:8)

### III. Simpulan:

Dalam ragam jenis dan bentuk pendidikan nonformal, salah satunya terdapat kursus dan magang. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Sedangkan magang merupakan proses belajar yang dilakukan anak di tempat tertentu baik itu didampingi oleh instruktur, ataupun tanpa didampingi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman kepada anak tentang proses mengerjakan suatu pekerjaan secara langsung di tempat kerja. Adapun bentuk – bentuk kursus yaitu: yaitu: 1) Kursus Wirausaha Kota (KWK), 2) Kursus Wirausaha Desa (KWD), 3)Kursus Para Profesi (KPP), dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama SMK/Politeknik/BLK /Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banowati, R. (2014). *Upaya Pengelola Lembaga Kursus Menjahit Dalam Mempersiapkan Lulusannya Memasuki Lapangan Kerja (Skripsi)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Daryanto, H. (2008). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Joesoef, Soelaman. (1992). *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamil, M. (2010). *Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep Dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Komar, O. (2006). *Filsafat Pendidikan Nonformal*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- Surat Keputusan mendikbud nomor 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981.
- Triyana, Y. F. (2012). *Tips Merintis Dan Mengelola Berbagai Lembaga Kursus*. Yogyakarta: Laksana

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**(PENYULUHAN DAN KELOMPOK BELAJAR)**

**I. Tujuan :**

1. Mahasiswa mampu memahami tentang penyelenggaraan pendidikan non formal
2. Mahasiswa mampu memahami lembaga pendidikan nonformal
3. Mahasiswa mampu memahami ragam bentuk dari penyelenggaraan pendidikan non formal (penyuluhan dan kelompok belajar)

**II. Materi :** Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Penyuluhan dan Kelompok Belajar)

**A. Pengertian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**

1. Pengertian Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan perencanaan pendidikan non formal secara strategis harus menghargai nilai- nilai sosial budaya, seperti tradisi, adat istiadat, dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat dan melibatkannya dalam proses pendidikan.

Bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal secara terstruktur dan berjenjang antara lain kursus komputer, kursus bahasa inggris, kelompok belajar paket A, paket B, dan Paket C yang merupakan lembaga khusus yang mempunyai tingkat kecakapan. Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang misalnya informasi, penyuluhan, ceramah, seminar, dan lain sebagainya.

Agar penyelenggaraan PNF melalui PKBM sebagai salah satu pendidikan berbasis masyarakat (Community based education) dapat efektif untuk mengembangkan kualitas manusia, diperlukan adanya program PNF yang dikembangkan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bukan dilakukan secara trial and error (coba-coba), bahkan ala kadarnya. Pengembangan program

merupakan serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan program-program yang benar-benar mampu memberikan manfaat yang optimal.

## 2. Pengertian Pendidikan Non Formal

Sudjana (2010:21) Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan non formal juga dikelompokkan ke dalam pendidikan luar sekolah yang hal ini diatur dalam PP No. 73 tahun 1991. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luarsekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non formal sudah ada sejak dulu dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat lebih tua dari pada keberadaan pendidikan sekolah. Para Nabi dan Rasul yang melakukan perubahan mendasar terhadap kepercayaan, cara berfikir, sopan santun dan cara-cara hidup di dalam menikmati kehidupan dunia ini, berdasarkan sejarah, usaha atau gerakan yang dilakukan bergerak di dalam jalur pendidikan non formal sebelum lahirnya pendidikan sekolah. Gerakan atau dahwah nabi dan Rosul begitu besar porsinya pembinaan yang ditujukan pada orang-orang dewasa dan pemuda. Para Nabi dan Rosul berurusan dengan pendidikan dan pembangunan



masyarakat melalui pembinaan orang dewasa dan pemuda yang berlangsungnya diluar system persekolahan.

### 3. Pengertian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Soelaman (1992: 58) mengemukakan bahwa Sistem Pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan non formal meliputi:

- Kelompok, organisasi dan lembaga,
- Mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan,
- Kesenian tradisional, seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya.,
- Prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah dan alat-alat pelengkapan kerja.

Dari sisi target grup yang disebut sebagai sasaran didik, pendidikan non formal memiliki cakupan garapan yang sangat luas sarta besar variabilitasnya. Khalayak sasaran yang ingin/ harus dilayani pendidikan non formal terentang seiring dengan kebutuhan belajar manusia untuk belajar.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non formal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran seperti penyuluhan dan kelompok belajar serta proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

## **B. Penyuluhan dan Kelompok Belajar Pendidikan Non Formal**

### 2. Pengertian Penyuluhan

Pada pendidikan non formal bagi petani/nelayan, penyuluh adalah guru bagi mereka. Sama dengan pendidikan formal, pendidikan non formal (dalam bahasan ini adalah penyuluhan pertanian) juga memiliki tujuan yang harus dicapai tetapi sebagai pendidik/penasehat bagi petani dan keluarganya, pekerjaan penyuluh tidak terbatas pada

mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga memotivasi, membimbing dan mendorong petani mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusaha sehingga dapat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penyuluhan, baik materi, metode maupun media yang digunakan seorang penyuluh dengan penyuluh yang lain, bahkan penyuluh yang sama dapat menerapkan metode yang berbeda tergantung pada kebutuhan sasaran, tingkat pengetahuan, karakteristik wilayah, tingkat pengalaman sasaran. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satupun metode dapat dikatakan efektif dan efisien yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran. Sebagai contoh, penyuluh pada daerah yang relative maju dengan tingkat pengetahuan peserta didik lumayan tinggi (setingkat SMA pada pendidikan formal), memiliki sikap mental *knowledge attitude* (selalu ingin tahu) dapat menggunakan metode ceramah dengan bantuan media tercetak (leaflet, brosur, dll) yang dilanjutkan dengan diskusi.

Pada kondisi daerah yang sama tetapi sikap mental sasaran adalah *ego defensive attitude* (terlalu berprasangka terhadap hal baru), penggunaan metode ceramah kurang efektif karena pada sikap mental ini sasaran cenderung untuk tidak percaya tanpa melihat bukti nyata. Pada kondisi tersebut, metode demonstrasi merupakan pilihan. Pada metode demonstrasi, apabila hanya ada seorang petani yang mau dan mampu menjadi demonstrator maka metode yang dipilih adalah demonstrasi plot usahatani (*demplot*) dengan luasan 0,1-0,5 ha untuk komoditi tanaman atau satu satuan unit usaha keluarga peternakan. Dengan menggunakan metode *demplot*, petani sasaran dapat melihat secara nyata dampak penerapan inovasi teknologi. Sedangkan bila ada beberapa orang dalam kelompok yang mau dan mampu menjadi demonstrator maka metode yang lebih efektif adalah demonstrasi usahatani secara kelompok (*demfarm*), karena selain melihat secara nyata dampak penerapan inovasi teknologi, petani sasaran juga

mendapat gambaran nyata tentang penerapan teknologi melalui kerjasama kelompok.

Penyuluh harus memahami kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki peserta didik dalam usaha mengembangkan swadaya dan kemandirian peserta didik. Untuk memahami hal tersebut, seorang penyuluh harus memiliki kemampuan untuk menganalisa dan mengkaji secara mendalam apa yang menjadi minat dan kebutuhan peserta didik, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh ketersediaan sumberdaya alam serta prioritas dari minat dan kebutuhan tersebut.

### 3. Kelompok Belajar

Kelompok belajar adalah pendidikan non formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar. Adapula yang dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM).

Jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pem-berdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ada beragam satuan pendidikan nonformal yang dikembangkan masyarakat saat ini. Satuan pendidikan nonformal lainnya adalah kelompok belajar (Kejar), yaitu satuan pendidikan nonformal yang

terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

### **C. Ragam Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (Penyuluhan dan Kelompok Belajar**

Lembaga pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan tau guru pada lembaga pendidikan nonformal adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini tertuang dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Bab1, Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5. Peserta didik dalam hal ini adalah masyarakat luas.

Pendidikan nonformal juga dikelompokkan kedalam pendidikan luar sekolah yang hal ini diatur dalam PP No. 73 tahun 1991. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan diluarsekolah baik dilembaga pemerintah, nonpemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, dari *journal of nonformal education* kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah strategi *fund raising* (penggalangan dana) dalam penyelenggaraan program PNF yang dilakukan oleh PKBM Ceria menggunakan strategi edukasi publik, strategi layanan donasi, dan strategi kompetisi. Strategi edukasi publik berhubungan dengan bagaimana masyarakat mengetahui dan sadar tentang apa yang seharusnya dilakukan (bersikap) terhadap penyelenggaraan program pendidikan untuk peningkatan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat, Strategi penggalangan layanan donasi (swadaya masyarakat) meliputi mobilisasi dana berbentuk finansial dan mobilisasi non finansial guna mendukung terlaksananya program PNF, dan Strategi

kompetisi dengan mengikuti prosedur pengajuan dana bantuan sosial ke instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang relevan dengan tupoksi penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Pendidikan non formal petani sebagai wujud pendidikan orang dewasa (andragogi) yang berangkat memahami orang dewasa seutuhnya dengan dasar tanpa adanya paksaan, muncul dari kesadaran akan kekurangan diri serta tidak ada jenjang dalam pendidikan non formal. keluaran hasil, manfaat atau keuntungan dan dampak atau impek kegiatan penyuluhan dapat diukur tidak saja secara kualitatif namun juga perlu dikualitatifkan berupa pertambahannya pengetahuan petani (cipta Afektif), perubahan dan semakin mantapnya sikap dan perilaku petani (rasa Kongnitif) serta meningkatnya keterampilan petani (cipta psikomotorik) dalam rangka meningkatkan produktifitas dan produksi pertanian serta pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. dari sebuah buku karya Soedijanto 2004. menjabarkan enam dimensi tahapan penjabaran khalayak sasaran penyuluhan dalam suatu sistem pendidikan non formal. antara lain :

- b. Belajar untuk mengetahui dengan lebih menonjokan aspek kongnitif. dari sistem penyuluhan (*learning to know*).
- c. Belajar untuk mengerjakan dengan lebih mendominasi aspek afektif dalam sistem penyuluhan (*learning to do*)
- d. Belajar hidup bersama dengan kelompok dengan lebih menampilkan aspek pematapan sikap dan kepemimpinan-psikomotorik dari sistem penyuluhan (*learning to live togeder*)
- e. Belajar untuk diri sendiri pengembangan keperiadian psikomotorik antara lain berlatih disiplin, untuk kemajuan diri sendiri dengan lebih menampilkan aspek otodidak (*learning to be*)
- f. Belajar untuk kemajuan masyarakat (*learnig to be society*) belajar memimpin manajemen organisasi (*learning to organiz*)

### III. Kesimpulan

Pendidikan Nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas manusia, terlebih di era globalisasi sekarang ini. Untuk meningkatkan efektifitas pendidikan non formal dalam pengembangan kualitas manusia, yang perlu dilakukan para penyelenggara pendidikan nonformal, maupun komunitas pendidikan nonformal. Pertama, perlu menata konsep yang tepat tentang program-program pendidikan nonformal. Kedua, perlu merencanakan program pendidikan nonformal berbasis kebutuhan nyata warga sasaran. Ketiga, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nonformal secara tekun dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang tepat guna, secara lebih singkat dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pendidikan nonformal dalam pengembangan kualitas manusia maka diperlukan upaya penataan ketenagaan PNF menjadi lebih profesional yang mampu menata konsep yang tepat tentang PNF dan dapat merencanakan program PNF yang berbasis kebutuhan serta mengembangkan kelembagaan PNF

#### Soal Dan Jawaban :

##### Pilihan Ganda :

1. Apa saja ragam bentuk dari penyelenggaraan pendidikan non formal yaitu?
  - a. Kelompok belajar dan penyuluhan
  - b. Kelompok individu dan Pembinaan
  - c. Pendidikan karakter dan masyarakat
  - d. Pendidikan kelompok dan individu
2. Tahapan penjabaran khalayak sasaran penyuluhan dalam suatu sistem pendidikan non formal yaitu antara lain?Kecuali....
  - a. Belajar untuk mengetahui dengan lebih menonjokan aspek kongnitif.dari sistem penyuluhan (*learning to know*).
  - b. Belajar untuk mengerjakan dengan lebih mendominasi aspek kreatif dalam sistem penyuluhan (*learning to do*)

- c. Belajar hidup bersama dengan kelompok dengan lebih menampilkan aspek pemantapan sikap dan kepemimpinan-psikomotorok dari sistem penyuluhan (*learning to live togeder*)
  - d. Belajar untuk diri sendiri penganbangan keperiadian psikomotorik antara lain berlatih disipli, untuk kemajuan diri sendiri dengan lebih menampilkan aspek otodidak (*learning to be*)
3. Apa saja yang termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal dalm ragam bentuk penyuluhan?
    - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    - b. Pendidikan Balita
    - c. Pendidikan pem-berdayaan Manula
    - d. Pendidikan Guru
  4. Apa saja yang termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal dalm ragam bentuk Kelompok Belajar?
    - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    - b. Pendidikan Balita
    - c. Pendidikan pem-berdayaan Manula
    - d. Penyuluhan Pertanian
  5. lembaga pendidikan nonformal adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini tertuang dalam Undang-Undang ?
    - a. PP No. 73 tahun 1992
    - b. UUD 1945
    - c. PP No 16 Tahun 1998
    - d. SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
  6. Menurut Soelamanbahwa Sistem Pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan non formal melputi?
    - a. Individu, organisasi dan lembaga,
    - b. Mekenisme budaya budaya seperti perlombaan dan pertandingan,

- c. Kesenian tradisional, seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya.,
  - d. Kebutuhan dalam membangun pendidikan non formal
7. penyelenggaraan PNF melalui PKBM sebagai salah satu pendidikan berbasis
- a. Masyarakat
  - b. Individu
  - c. Kelompok
  - d. Keluarga
8. Dalam *journal of nonformal education* dapat ditarik dari hasil penelitian ini dan membutuhkan strategi untuk menunjang, yaitu dengan menggunakan...
- a. Strategi *fund raising* (penggalangan dana)
  - b. Strategi *Education*
  - c. Strategi *feed back*
  - d. Strategi Kelompok
9. Para Nabi dan Rosul melakukan engan pendidikan dan pembangunan masyarakat melalui?
- a. Pendidikan Individu
  - b. Pembinaan orang dewasa dan pemuda yang berlangsungnya diluar system persekolahan.
  - c. Pembinaan melakukan peperangan
  - d. Pendidikan Indonesia
10. Dalam penyelenggaraan pendidikan non formal, terdapat kelompok belajar dan memiliki tujuannya secara jelas, yaitu seperti....
- a. Untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar
  - b. Untuk meingkatkan mutu pengganguran
  - c. Untuk meningkatkan Status Pernikahan
  - d. Untuk mendorong masyarakat aktif



**Essay :**

- 1 Apa pengertian dari penyelenggaraan pendidikan non formal?
- 2 Sebutkan perbedaan antara penyuluhan dan kelompok belajar dalam penyelenggaraan pendidikan non formal?
- 3 Sebutkan penyelenggaraan pendidikan non formal yang sudah berjalan hingga sekarang?
- 4 Sebutkan penyelenggaraan-penyelenggaraan dalam pendidikan nonformal yang terdapat di indonesia?
- 5 Dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memiliki perundang-undangan yang mengatur. Sebutkan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut?

**Jawaban**

**Pilihan Ganda :**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. A | 6. C  |
| 2. B | 7. A  |
| 3. A | 8. A  |
| 4. D | 9. B  |
| 5. D | 10. A |

**Essay :**

1. Adalah Suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran seperti penyuluhan dan kelompok belajar serta proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
2. penyuluh adalah guru bagi mereka. Sama dengan pendidikan formal, pendidikan non formal (dalam bahasan ini adalah penyuluhan pertanian) juga memiliki tujuan yang harus dicapai tetapi sebagai pendidik/penasehat bagi petani dan keluarganya, pekerjaan penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga memotivasi, membimbing dan mendorong petani mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusahatani sehingga dapat hidup

yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan Kelompok belajar adalah pendidikan non formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar. Adapula yang dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM).

3. Yaitu penyelenggaraan program PNF yang dilakukan oleh PKBM Ceria menggunakan strategi edukasi publik, strategi layanan donasi, dan strategi kompetisi. Strategi edukasi publik berhubungan dengan bagaimana masyarakat mengetahui dan sadar tentang apa yang seharusnya dilakukan (bersikap) terhadap penyelenggaraan program pendidikan untuk peningkatan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat, Strategi penggalangan layanan donasi (swadaya masyarakat) meliputi mobilisasi dana berbentuk finansial dan mobilisasi non finansial guna mendukung terlaksananya program PNF, dan Strategi kompetisi dengan mengikuti prosedur pengajuan dana bantuan sosial ke instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang relevan dengan tupoksi penyelenggaraan pendidikan nonformal.
4. Yang terstruktur : kelompok belajar paket A, paket B, paket C, kursus komputer, kursus bahasa inggris, dan lain sebagainya. Yang tidak terstruktur : seminar, informasi, penyuluhan, pelatihan yang tidak terjadwal, dan lain sebagainya.
5. Penyelenggaraan pendidikan non formal di atur di dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, dan juga pasal 100 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

Soelaman Joesoef, 1992, *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prof.H.D.Sudjana.S.,S.Pd.,M.Ed.,PhD.,2010,*PendidikanNonFormal:Wawasan,SejarahPerkembangan,Filsafat&TeoriPendukungSertaAsas*,Bandung:Falaf Production

Hiryanto, M.SI, 2009, *Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Non Formal dalam Pengembangan Kualitas Manusia*, Bandung: IKIP

Muhammad Arief Rizka, 2017, *journalofnonformaleducation* Banten: UNNES

**BAB V**  
**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Tujuan Pembelajaran :** 1. Mahasiswa mampu memahami tentang manajemen pendidikan
2. Mahasiswa mampu memahami lembaga pendidikan nonformal
  3. Mahasiswa mampu memahami permasalahan dalam manajemen pendidikan nonformal
  4. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan nonformal

**Materi :** Manajemen Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal

**A. Pengertian Manajemen Pendidikan**

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin dari kata "*manus*" yang artinya "*tangan*" dan "*agere*" yang berarti "melakukan". Kata-kata ini digabung menjadi "*managere*" yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada (Asmendri 2012: 1). Manajemen menurut Terry (1986) adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Harsey dan Blanchard (1988: 4) manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan

keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Dari pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## 2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan (*education*) secara semantik berasal dari bahasa Yunani *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Pedagogos* adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para *paedagogos*. Istilah ini berasal dari kata *paedos* yang berarti anak, dan *agogos* yang berarti saya membimbing atau memimpin.

Menurut Langeveld (1971: 5) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datang dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### 3. Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan menurut Purwanto (1970: 9) adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar, seperti mengenai perumusan *policy*, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Usman (2004: 8) manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Nawawi (1983: 11) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama lembaga pendidikan formal.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia

yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

## **B. Lembaga Pendidikan Nonformal**

### **1. Pengertian Lembaga Pendidikan Nonformal**

Menurut Abu Ahmadi mengartikan lembaga pendidikan non formal kepada semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal) dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam proses penyelenggaraannya.

Menurut Gerhana Sari Limbong yang mengutip pernyataan Muhammad Dahrin, lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar lembaga pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya dalam Undang-Undang SISDIKNAS dijelaskan bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap.

Lembaga pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidik atau guru pada lembaga pendidikan nonformal adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini tertuang dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1, Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5. Peserta didik dalam hal ini adalah masyarakat luas.

Pendidikan non formal juga dikelompokkan ke dalam pendidikan luar sekolah yang hal ini diatur dalam PP No. 73 tahun 1991. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Yang termasuk jalur

pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat.

## 2. Jenis Lembaga Pendidikan Nonformal

Jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pem-berdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ada beragam satuan pendidikan nonformal yang dikembangkan masyarakat saat ini. Beberapa bahkan sudah familiar di telinga masyarakat, sebut saja lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga ini berfungsi menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Satuan pendidikan nonformal lainnya adalah kelompok belajar (Kejar), yaitu satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Adapula yang dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM).



Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan nonformal di Indonesia, yaitu:

1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal: adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan sumberdaya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB): adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi dan karakteristik propinsinya.
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB): adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dan potensi lokal setiap daerah.
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat.
5. Lembaga PNF sejenis: adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang memberikan pelayanan

pendidikan nonformal berorientasi *life skills*/keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-kategori di atas, seperti; LPTM, Organisasi Perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

### **C. Permasalahan dalam Manajemen Pendidikan Nonformal**

Permasalahan yang timbul dalam manajemen pendidikan nonformal yaitu:

a. Kurangnya koordinasi,

Disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non departemen, menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal. Berbagai lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin akan digarap oleh berbagai lembaga, sebaliknya mungkin suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga. Oleh karena itu koordinasi antar pihak penyelenggara program pendidikan nonformal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal.

b. Kelangkaan pendidik profesional,

Tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang. Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman

pendidikan nonformal. keterlibatan mereka dalam program pendidikan didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau karena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja, dan mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan formal. Kenyataan ini sering mempengaruhi cara penampilan mereka dalam proses pembelajaran antara lain dengan menerapkan pendekatan mengajar pada pendidikan formal di dalam pendidikan nonformal sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Pengelolaan program pendidikan nonformal 'memerlukan pendekatan dan keterampilan yang relatif berbeda dengan pengelolaan program pendidikan formal. Untuk mengatasi kelemahan itu maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik yang ada dalam pengadaan tenaga profesional pendidikan nonformal.

c. Motivasi belajar yang relatif rendah

Motivasi belajar peserta didik relatif rendah. Kelemahan ini berkaitan dengan:

- 1) Adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk perolehan ijazah.
- 2) Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan formal dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didik.
- 3) Masih terdapat program pendidikan, yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dibidang ekonomi, tidak dilengkapi dengan masukan lain (*other input*) sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya.

- 4) Para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan status pendidikan formal, malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan nonformal.

Dengan demikian, kelemahan-kelemahan di atas merupakan beberapa contoh yang muncul di lapangan. Namun pendidikan nonformal makin lama makin diakui pentingnya dan kehadirannya sebagai pendidikan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa serta sebagai bagian penting dari kebijakan dan program pembangunan.

#### **D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Nonformal**

Prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan nonformal ini bisa dikategorikan sangat penting karena perannya melibatkan banyak sumber daya manusia/orang. Dalam prinsi-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan nonformal ini pada dasarnya sama dengan prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan formal dan informal, maka dari itu prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan nonformal yaitu:

1. Pembagian Kerja

Pembagian kerja diantara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. Tujuan pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam sesuatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai.

3. Disiplin

Sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja yang akan menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Hakekat dari kepatuhan adalah disiplin, yakni melakukan apa yang sudah disetujui

bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, baik persetujuan yang tertulis lisan maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan.

4. Kesatuan Perintah

Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya.

5. Kesatuan Pengarahan

Meskipun organisasi selalu terdiri atas berbagai bidang, wewenang dan tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi.

6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum

Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan organisasi yang harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi.

7. Balasa Jasa/Imbalan

Prinsip ini berakar dari prinsip keadilan yang kaidahnya adalah al-ujrah biqadr al-masyaqah, upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya. Jabatan dan tanggung jawab diukur yang besar harus didukung oleh upah yang seimbang dengan beban yang dipikulnya.

8. Sentralisasi

Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. Manajer utama atau manajemen puncak memiliki wewenang tertinggi yang didelegasikan kepada manajer fungsional di bawahnya.

9. Rantai berkala/hirarki

Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hirarki, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenang.

10. Order/susunan

Asas keterlibatan atau keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Adapun ketertiban yang berkaitan dengan aspek sosial, yaitu dalam menempatkan karyawan di

dalam organisasi ataupun perusahaan, norma yang seharusnya berlaku adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya.

#### 11. Keadilan

Prinsip persamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaannya yang berbeda, serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Demikian pula, penerapan sanksi bagi pelanggaran aturan organisasi, jenis sanksi tidak sama, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

#### 12. Stabilitas staf organisasi (kestabilan jabatan karyawan)

Dalam prinsip manajemen, prinsip kestabilan jabatan mencakup situasi perusahaan yang membuat para karyawannya merasa nyaman dalam bekerja dan selalu berprestasi.

#### 13. Inisiatif

Inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas sekehendak para karyawan. Manajer harus memberikan dorongan kepada seluruh bawahannya untuk berinisiatif sendiri mengembangkan kinerjanya, tetapi harus tetap 'searah dengan visi dan misi perusahaan.

#### 14. Esprit de corp (asas kesatuan)

Prinsip ini bertitik pada kesatuan visi dan misi yang divanangkan oleh organisasi atau perusahaan. Seluruh karyawan bagaikan jaring laba-laba yang bersatu sebagai team work yang solid memperjuangkan tujuan perusahaan.

Adapun prinsip manajemen yang pada dasarnya yaitu:

1. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
2. Prinsip Pengelolaan
3. Prinsip Pengutamaan Tugas Pengelolaan
4. Prinsip Kepemimpinan yang Efektif
5. Prinsip Kerja Sama

## **Kesimpulan**

Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terancang, terorganisasi, terkoordinasi, yang melibatkan sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan tertentu yang efektif dan efisien. Dalam pendidikan nonformal para pendidik harus memiliki suatu sikap profesional untuk memenuhi kebutuhan peserta didik atau warga belajar serta untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pada manajemen pendidikan nonformal ada empat belas prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan nonformal yang harus dikelola dengan baik dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan nonformal.

Selain itu adapula permasalahan yang harus dihadapi bahkan diselesaikan dalam manajemen pendidikan nonformal. Permasalahan itu bisa diselesaikan dengan mudah jika setiap pendidik atau bahkan sumber daya yang bersangkutan dengan manajemen pendidikan nonformal itu bisa saling bekerja sama dengan baik, maka permasalahan tersebut bisa diatasi dengan baik pula. Dan manajemen pendidikan nonformal ini sangat penting bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan di formal.

## **Soal Dan Jawaban :**

### **Pilihan Ganda :**

1. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Pengertian menurut siapakan itu?
  - a. Asmendri 2012:1
  - b. Harsey dan blanchard 1988:4
  - c. Terry 1986
  - d. Langeveld 1971:5
2. Apa yang di maksud dengan pendidikan nonformal menurut Abu Ahmadi?
  - a. lembaga pendidikan non formal kepada semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana diluar kegiatan

- lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal) dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam proses penyelenggaraannya.
- b. jalur pendidikan diluar lembaga pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  - c. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
  - d. pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar lembaga pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
3. Apa yang di maksud dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ?
    - a. unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal).
    - b. lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal berorientasi *life skills*/keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-kategori
    - c. lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat.
    - d. unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah.
  4. Berikut ini manakah yang bukan dari permasalahan manajemen pendidikan non formal?
    - a. Kelangkaan pendidik professional
    - b. Motivasi belajar yang relatif rendah
    - c. Kurangnya koordinasi,
    - d. Kesenambungan dan berkelanjutan
  5. Manakah yang termasuk salah satu dari prinsip-prinsip manajemen?
    - a. Prinsip Kepemimpinan yang Efektif
    - b. Prinsip peningkatan dan pengembangan
    - c. Prinsip inovasi
    - d. Prinsip perencanaan



6. Ada berapa jenis lembaga pendidikan non formal di inonesia?
  - a. 3
  - b. 7
  - c. 6
  - d. 5
7. Dalam prinsip-prinsip manajemen pendidikan non formal ada salah satu prinsip sentralisasi, apa yang di maksud dengan prinsip sentralisasi itu?
  - a. Prinsip ini berakar dari prinsip keadilan yang kaidahnya adalah al-ujrah biqadr al-masyaqah, upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya.
  - b. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang.
  - c. Prinsip persamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaannya yang berbeda, serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.
  - d. Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hirarki, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenang.
8. Apa isi dari Pendidikan non formal yang dikelompokkan ke dalam pendidikan luar sekolah yang diatur dalam PP No. 73 tahun 1991?
  - a. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak.
  - b. Lembaga pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
  - c. lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar lembaga pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  - d. lembaga pendidikan non formal kepada semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana diluar kegiatan

lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal) dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam proses penyelenggaraannya.

9. Apa yang di maksud dengan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)?
  - a. unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi dan karakteristik propinsinya.
  - b. unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal).
  - c. unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah.
  - d. lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat.
10. Ada berapa prinsip-prinsip manajemen pendidikan non formal?
  - a. 17
  - b. 14
  - c. 19
  - d. 8

**Essay :**

1. Apa isi dari Manajemen pendidikan menurut Purwanto (1970: 9)?
2. Sebutkan jenis-jenis lembaga pendidikan non formal yang ada di indonesia!
3. Apa yang di maksud dengan Wewenang dan tanggung jawab dan Stabilitas staf organisasi (kestabilan jabatan karyawan) dalam prinsip-prinsip manajemen pendidikan non formal?
4. Sebutkan dan jelaskan permasalahan pendidikan non formal di indonesia yang kamu ketahui minimal 3 permasalahan!
5. Apa yang di maksud dengan kelemahan dari Motivasi belajar yang relatif rendah?

## **Jawaban**

### **Pilihan Ganda :**

1. C
2. A
3. A
4. D
5. A
6. D
7. B
8. A
9. A/C
10. B

### **Essay :**

1. Manajemen pendidikan menurut Purwanto (1970: 9) adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar, seperti mengenai perumusan *policy*, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya.
2. - Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
  - Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)
  - Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
  - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - Lembaga PNF sejenis
3. a. Wewenang dan Tanggung Jawab

Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam sesuatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai.

b. Stabilitas staf organisasi (kestabilan jabatan karyawan)

Dalam prinsip manajemen, prinsip kestabilan jabatan mencakup situasi perusahaan yang membuat para karyawannya merasa nyaman dalam bekerja dan selalu berprestasi.

4. Permasalahan yang timbul dalam manajemen pendidikan nonformal yaitu:
  1. Kurangnya koordinasi,

Disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non departemen, menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal. Berbagai lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin akan digarap oleh berbagai lembaga, sebaliknya mungkin suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga. Oleh karena itu koordinasi antar pihak penyelenggara program pendidikan nonformal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal.
  2. Kelangkaan pendidik profesional,

Tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang. Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal. keterlibatan mereka dalam program pendidikan didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau kerena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja, dan mereka pada

umumnya berlatar belakang pendidikan formal. Kenyataan ini sering mempengaruhi cara penampilan mereka dalam proses pembelajaran anatara lain dengan menerapkan pendekatan mengajar pada pendidikan formal di dalam pendidikan nonformal sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Pengelolaan program pendidikan nonformal memerlukan pendekatan dan keterampilan yang relatif berbeda dengan pengelolaan program pendidikan formal. Untuk mengatasi kelemahan itu maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik yang ada dalam pengadaan tenaga profesional pendidikan nonformal.

### 3. Motivasi belajar yang relatif rendah

Motivasi belajar peserta didik relatif rendah. Kelemahan ini berkaitan dengan:

- a. Adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk perolehan ijazah.
- b. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan formal dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didik.
- c. Masih terdapat program pendidikan, yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dibidang ekonomi, tidak dilengkapai dengan masukan lain (*other input*) sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya.
- d. Para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan status pendidikan formal, malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan nonformal.

5. Motivasi belajar peserta didik relatif rendah. Kelemahan ini berkaitan dengan:
  1. Adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk perolehan ijazah.
  2. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan formal dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didik.
  3. Masih terdapat program pendidikan, yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dibidang ekonomi, tidak dilengkapi dengan masukan lain (*other input*) sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya.
  4. Para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan status pendidikan formal, malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan nonformal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmendri. 2012. *Teori Dan Aplikasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah/Madrasah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Haidar Putra Daulay. (2002). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Medan; IAIN Press.
- Hersey, P. & Blanchard, K. H. 1988. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. (5th Edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

- Langeveld. 1971. *Paedagogik Teoritis/Sistematis*. Jakarta: FIP-IKIP
- Limbong, Gerhana, Sari. 2018. *Peranan Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia*. Makalah Pasca IAIN Sumut Medan.
- Nawawi, Hadari. 1983. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- PP No.73 Tahun 1991. *Pendidikan Non Formal*.
- Purwanto, M Ngalim. 1970. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Rahmat, Abdul. 2017. *Manajemen Pendidikan Non Formal*. Jawa Timur: Penerbit Wade.
- Terry, George R. 1986. *Asas-Asas Manajemen*. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. Bab 1 dan 3. *Pendidikan Non Formal*.
- Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. Bab 1 dan 5. *Lembaga Pendidikan Non Formal*.
- Usman, Husaini. 2004. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

**BAB VI**  
**PERENCANAAN STRATEGIS LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Tujuan Pembelajaran**

- a. Mahasiswa mampu mengetahui tentang perencanaan pendidikan nonformal
- b. Mahasiswa mampu mengetahui proses penyelenggaraan pendidikan nonformal
- c. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknik manajemen pendidikan nonformal

**Materi**

**1. Perencanaan Pendidikan Non Formal**

Berbicara perencanaan merupakan cakupan manajemen, karena pada dasarnya perencanaan merupakan bagian dari manajemen. Manajemen program pendidikan non formal adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Beberapa pengertian manajemen yang di kemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

- Menurut Drs. Oey Liang Lee mengartikan manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- Pengertian manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan terhadap sumberdaya organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.
- Pengertian manajemen menurut R. Terry adalah suatu proses khas terdiri tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan yang dilakukan dalam menentukan serta mencapai target



yang sudah ditetapkan lewat pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya.

- Pengertian manajemen menurut Bateman, Thomas S., and Scott A. Snell. (2004) adalah suatu seni untuk mencapai tujuan tertentu lewat usaha yang dilakukan oleh orang lain.
- Pengertian manajemen menurut Stoner adalah suatu proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin segala macam usaha daripada anggota organisasi dan menggunakan segala sumber daya organisasi dalam mencapai sasaran.

Fungsi dari perencanaan Pendidikan Non Formal dalam pembangunan masyarakat adalah : 1) Menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan PNF yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non formal. 2) Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah yang harus di tempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non formal, antara lain<sup>1</sup>:

#### 1. Melakukan Studi Kelayakan.

Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran. Aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Tingkat penghidupan masyarakat
- b. Sarana pendidikan yang ada.
- c. Sumber mata pencaharian penduduk
- d. Potensi alam dan lingkungannya
- e. Kesehatan lingkungan (gizi, kondisi rumah dll.)
- f. Tata cara hidup bersama, adat istiadat, kebiasaan dll.
- g. Sarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
- h. Sifat khas masyarakat yang menonjol.

---

<sup>1</sup>Sudjana, Djuju. (2006). *Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (hal.56).

## 2. Analisis Studi Kelayakan

Hasil analisis studi kelayakan ini, memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya dapat disusun alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## 3. Menetapkan Daerah Pengembangan

Hasil analisis dan alternatif-alternatif yang tersedia, dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. 1. Merumuskan Tujuan.

Setelah menetapkan lokasi sasaran, maka perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan PLS.

## 2. Menentukan populasi sasaran

Deskripsi yang tepat mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan.

Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

4. Motivasi, kecenderungan dan minat peserta.

5. Kegairahan dan kemampuan peserta

c. Harapan-harapan dan cita-cita.

## 3. Mengidentifikasi Kebutuhan Belajar

Kebutuhan belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Yang berkaitan dengan hal ini:

a. Apa yang ingin diketahui / dipelajari

b. Sumber-sumber belajar yang dapat mendukung kebutuhan belajar masyarakat.

c. Kebutuhan belajar yang belum terungkap.

d. Mempertemukan kebutuhan belajar dan sumber belajar.

## 4. Merencanakan Penyampaian yang Tepat

Ada beberapa bentuk sistem penyampaian yang dapat digunakan dalam pengembangan program PNF :

b. Siaran pendidikan melalui radio dan televisi

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

d. Sistem Belajar Jarak Jauh

- e. Buku-buku Paket dan rekaman penjelasannya.
- f. Ceramah-ceramah reguler
- g. Taman Bacaan Masyarakat
- h. Pameran-pameran Pendidikan.
- c. Menetapkan Tugas-Tugas Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan.

Melalui diskusi bersama-sama dengan para peserta dan tokoh-tokoh masyarakat, maka dapat ditetapkan :

- a. Tempat dan waktu belajar
- b. Bahan belajar dan alat-alatnya

## **2. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

### **- Dasar penyelenggaraan PNF**

Dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal dari segi kesejahteraan, tidak bisa lepas dari lima aspek yaitu :

#### **a. Aspek pelestarian budaya.**

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga dimana (melalui berbagai perintah, tindakan dan perkataan) ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan nonformal pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung didalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak, atau antar anak dengan anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap nilai dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan, dan pembimbingan. Pada dasarnya semua tindakan itu bertujuan untuk mendidik, semua kegiatan yang berlangsung dilingkungan keluarga dilakukann untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun menurun.

#### **b. Aspek Teoritis**

Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan pendidikan nonformal adalah teori yang diketengahkan Phili H. Cooms (1973:10), tdak satupun lembaga pendidkan: formal, informal maupun nonformal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar

minimum esensial, singkatnya pendidikan harus berjalan beriringan antara pendidikan formal, informal dan nonformal agar semua lapisan masyarakat dapat mendapat pendidikan tidak terkecuali orang yang miskin. Uraian diatas cukup dijadikan gambaran bahwa pendidikan nonformal berperan sangat penting dalam kehidupan.

**c. Dasar Pijakan**

Ada tiga dasar pijakan bagi pendidikan nonformal sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu: UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah atau yang sekarang lebih dikenal pendidikan nonformal. Ketiga pasal tersebut mempunyai inti bahwa pendidikan nonformal adalah kumpulan individu yang memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Adapun bentuk-bentuk satuan pendidikan nonformal, meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis.

**d. Aspek Kebutuhan Terhadap Pendidikan**

Dewasa ini kebutuhan terhadap pendidikan tidak hanya ada di masyarakat perkotaan saja melainkan juga sampai ke pelosok desa, hal ini terjadi akibat perkembangan ekonomi, kemajuan iptek dan perkembangan politik, kesadaran ini juga tumbuh dikarenakan kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dalam kompetisi global yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai sebuah keahlian untuk bekerja. Sehingga pendidikan nonformal menjadi sebuah alternatif untuk mendapatkan pengetahuan atau untuk mengasah keahlian.

**e. Keterbatasan Lembaga Pendidikan Sekolah**

Pendidikan sekolah (pendidikan formal) terpaku dalam sebuah kurikulum baku yang harus dijalankan, sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan masyarakat terpenuhi (contohnya *skill* menjahit

dan kemampuan lainnya). Oleh karena itulah pendidikan nonformal diselenggarakan untuk memenuhinya.

- Proses penyelenggaraan PNF

Adapun Proses penyelenggaraan PNF ialah berangkat dari perencanaan yang telah dibuat di awal pendirian lembaganya, proses tersebut tak luput dari fungsi manajemen yakni fungsi *ACTUATING*.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya proses *actuating* merupakan proses implementasi seluruh perencanaan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia, namun dalam pelaksanaannya memerlukan analisis berbagai faktor penghambat maupun pendorong agar seluruh pengimplementasian rencana dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, P.H. and Ahmed, M. 1974, *Attacking rural poverty: How education can help*, Baltimore: John Hopkins University Press
- Mustafa Kamil 2009. *Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui PKBM di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta Press)
- Saleh Marzuki. 2009. *Dimensi-dimensi Pendidikan Nonformal*. Malang: UNM Press, hlm.136
- UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991
- Bateman, Thomas S., and Scott A. Snell. (2004)
- Sudjana, Djuju. (2006). *Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

**BAB VII**  
**RENCANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Tujuan Perkuliahan : Membahas dan Berlatih Keterampilan Manajemen Keterampilan Merencanakan Lembaga Pendidikan Nonformal
- Materi : Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (Rencana Operasional)

**A. Perencanaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

Dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang dapat menjadikan track / sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan atau program-program dalam lembaga pendidikan. Kemudian untuk mengefektifkan atau menerjemahkan perencanaan jangka panjang tersebut maka harus di rancang juga perencanaan operasional. Perencanaan Operasional ( Operasional Planing ) merupakan perencanaan jangka pendek untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih merinci.

Penyelenggaraan pendidikan non-formal harus sesuai dengan tujuannya yang tercantum pada Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (Pemerintah Republik Indonesia : 2003)

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang diatas tersebut maka di haruskan Menurut Morphet dalam Made pidarta (2005:101) prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional:

1. Mengumpulkan informasi dan analisa data
2. Menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan
3. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas
4. Membentuk alternatif-alternatif penyelesaian
5. Mengimplementasi, menilai dan memodifikasi

Dalam melakukan perencanaan operasional maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur yang harus diikuti dalam setiap melakukan perencanaan, sebab tanpa prosedur tersebut maka kurang sempurna perencanaan tersebut. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut :

Langkah 1: Menetapkan tujuan. Sering sebuah organisasi mempunyai banyak tujuan, maka harus memilih diantara banyak tujuan tersebut, tujuan dapat dirumuskan sesuai dengan maksud misi dan sasaran yang dikehendaki. Tentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, tujuan yang besar akan sukar dapat dicapai dengan sumber daya yang sangat terbatas, maka harus menetapkan tujuan yang terbaik bagi organisasi.

Langkah 2: Memahami atau merumuskan keadaan saat ini. Rencana adalah menyangkut kegiatan dimasa yang akan datang, apa yang dapat dilakukan dimasa yang akan datang sangat ditentukan pula keadaan atau posisi organisasi pada saat ini. Oleh karena itu organisasi harus mengetahui, memahami dan kemudian merumuskan posisinya saat ini. Untuk keperluan itu diperlukan data dan informasi yang relevan dengan tujuan organisasi.

Langkah 3: Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan. Organisasi harus melakukan identifikasi dan inventarisasi faktor-faktor kemudahan dan hambatan dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan mengetahui kemudahan-kemudahan, organisasi akan dapat memanfaatkan-kannya peluang tersebut sebaik-baiknya. Sebaliknya dengan mengetahui kemungkinan hambatan, maka organisasi sedini mungkin sudah mempersiapkan untuk menanggulangnya



atau mengantisipasi yang akan dirumuskan dan kemudian dirumuskan pada berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan.

Adapun dalam perencanaan operasional termasuk perencanaan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan Menurut Louis A. Allen dalam Made pidarta (2005:60) perencanaan terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- a) Meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang.
- b) Menetapkan maksud tujuan (objects) sebagai: hasil akhir yang diharapkan: menentukan tujuan atau sasaran (goals/target).
- c) Mengarahkan (programming), menetapkan urutan dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan: langkah-langkah yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaannya.
- d) Menyusun tata waktu (scheduling), menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukan dapat berhasil baik.
- e) Menyusun anggaran belanja (budgeting), yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia, dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan.
- f) Memperkembangkan prosedur-prosedur, membuat standar

Jika kita maknai pernyataan dari Louis A. Allen tersebut dengan rencana penyelenggaraan pendidikan nonformal sangatlah harmonis, yang pertama kita sebagai penyelenggara pendidikan nonformal harus dapat melakukan sebuah peramalan yang baik yang berhubungan dengan perkiraan waktu yang tepat untuk melaksanakan perencanaan dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal ini.

Kemudian yang kedua menetapkan maksud tujuan (objects) sebagai: hasil akhir yang diharapkan: menentukan tujuan atau sasaran (goals/target) harus tepat dan jelas, yang mana objek dari diselenggarakan pendidikan non formal ini untuk siapa, selain itu hasil akhirnya pun harus jelas untuk apa dibuatnya pendidikan nonformal ini, hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan.

Perencanaan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal kita harus dapat mengarahkan segala keputusan-keputusan yang diambil

dengan tepat sehingga langkah-langkah terkesan tidak bias ataupun percuma, dengan begitu dalam point ini leader harus berperan dengan bijak dan visioner.

Menyusun tata waktu (scheduling), menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukan dapat berhasil baik. Menyusun anggaran belanja (budgeting), yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia, dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Dan Memperkembangkan prosedur-prosedur, membuat standar. Hal-hal yang telah dijabarkan diatas sangat lah penting dan dapat dijadikan sebagai referensi kita dalam membuat rencana operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat rencana operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal yaitu komponen-komponen Rencana Operasional (Renop). Komponen-komponen Renop sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Program Pengembangan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada kurun waktu kegiatan dan rincian dari masing-masing komponen itu. Komponen-komponen Renop meliputi (Made Pidarta, 2005:45) :

1. Latar Belakang dan Rasional adalah alasan atau argumentasi yang mendasari kegiatan yang diusulkan. Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam bagian ini meliputi:
  - a. Penjelasan mengenai akar permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi pada telaah diri saat menyusun Renstra, yang akan diselesaikan dengan melaksanakan Renop ini. Masalah tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa, sehingga tergambar permasalahan tersebut secara utuh dan menyeluruh (termasuk cakupannya, berat/ringannya, faktor-faktor yg berpengaruh pada permasalahan tersebut).
  - b. Kebijakan dan tujuan yang dirumuskan dalam Rencana Tindak dalam dokumen Renstra
  - c. Apabila Renop yang disusun untuk tahun kedua dan seterusnya dari siklus implementasi Renstra, dalam latar belakang juga perlu dikemukakan:
    - 1) capaian-capaian tujuan jangka panjang yang telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya

- 2) Masalah dan kendala yang dihadapi yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
  - 3) Praktik-praktik baik (good practices) yang diperoleh pada tahun sebelumnya dan perlu dipertahankan pada Renop yang sedang disusun
- d. Argumentasi (alasan) tentang mengapa uraian Renop yang akan dilaksanakan adalah pilihan yang paling tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut diatas. Argumen/alasan tersebut dapat didasarkan pada pembenahan faktor-faktor yang berpengaruh pada akar permasalahan tersebut atau dapat berdasarkan teori ilmiah dan pengalaman dalam menghadapi akar permasalahan tersebut.
2. Sasaran adalah hasil yang akan peroleh pada akhir kegiatan operasional. Sasaran adalah penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil sekolah guna mencapai tujuan (target terukur). Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh sekolah atau unit yang ada di sekolah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap sasaran disertai target masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Rumusan sasaran yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Sasaran harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setta sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.
  - b. Sasaran ditetapkan mengacu pada dan merupakan milestone pencapaian visi, misi, tujuan sekolah, strategi, serta kebijakan dan tujuan yang dituangkan dalam Renstra Sekolah.
  - c. Sasaran harus dapat dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja.

- d. Sasaran harus mengacu pada masalah-masalah yang teridentifikasi dalam telaah diri dan merupakan upaya yang dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategik.
  - e. Sasaran harus merupakan tindak lanjut dari pengalaman atau permasalahan yang teridentifikasi pada tahun sebelumnya.
  - f. Spesifik, sasaran menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, dan bukan cara pencapaiannya.
  - g. Dapat dinilai dan terukur, sasaran harus terukur dan dapat digunakan untuk memastikan apa dan kapan pencapaiannya.
  - h. Menantang namun dapat dicapai, tetapi tidak boleh mengandung target yang tidak layak.
  - i. Berorientasi pada hasil, sasaran harus mensepesifikasikan hasil yang ingin dicapai.
3. Dapat dicapai dalam waktu tahun tertentu.
4. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi, serta untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) sekolah atau unit kerja yang ada di bawahnya. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi:
- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
  - b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program/kegiatan.

- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja sekolah atau unit kerja yang ada di dalamnya.
5. Rancangan Kegiatan dengan menentukan jenis dan tahap-tahap pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan operasional selama satu tahun. Pada setiap langkah (sub-kegiatan) harus dijelaskan, maksud dan tujuannya yang ingin dicapai secara ringkas dan jelas. Rancangan kegiatan yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.
6. Sumber daya yang dicantumkan dalam Renop merupakan uraian rinci mengenai jenis, kualifikasi, dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dijaga keberlangsungannya (sustainability). Sumber daya ini dapat meliputi SDM, pra-sarana dan sarana pendidikan, buku-buku perpustakaan, keahlian, informasi, teknologi, sistem manajemen, networking, bahan habis pakai untuk kegiatan manajemen. Sumber daya dan dana yang dibutuhkan antara lain:
  - a. jenis dan kualifikasi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kegiatan.
  - b. jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan untuk pengadaan, peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan pengoperasian sumber daya yang dibutuhkan.
7. Jadwal Kegiatan mencakup kapan pekerjaan sesungguhnya dilaksanakan dan batas waktu tugas harus diselesaikan. Sub kegiatan atau tahapan kegiatan yang dicantumkan pada bagian ini, harus sama dengan sub kegiatan atau tahapan kegiatan yang diuraikan pada bagian Rancangan Kegiatan.
8. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat atau staf yang bertanggung jawab keterlaksanaan Renop.

**Kesimpulan :**

Pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan Negaranya.

Penyelenggaraan pendidikan non-formal harus sesuai dengan tujuannya yang tercantum pada Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang diatas tersebut maka yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional yaitu Mengumpulkan informasi dan analisa data, Menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan, Mengidentifikasi tujuan dan prioritas, Membentuk alternatif-alternatif penyelesaian dan Mengimplementasi, menilai dan memodifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Joeseof, Soelaiman, 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Non Formal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhibbin, Syah, 1995. Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Made Pidarta, 2005. Perencanaan pendidikan partisipatori dengan pendekatan sistem, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

## Soal dan Jawaban

Pilihan ganda

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dibutuhkan suatu perencanaan.

Program dalam melaksanakan perencanaan dalam lembaga pendidikan adalah....

- a. Jangka pendek
  - b. Jangka menengah
  - c. Jangka panjang
  - d. Jangka pendek dan panjang
2. Dalam pasal 26 undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan non formal berfungsi sebagai....
- a. Pengganti pendidikan formal
  - b. Penambah pendidikan formal
  - c. Pelengkap pendidikan formal
  - d. Semua benar
3. Berikut ini prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pendidikan. Kecuali....
- a. Mengumpulkan informasi dan analisa data
  - b. Tidak adanya implementasi, menilai dan mengidentifikasi
  - c. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas
  - d. Membentuk alternatif-alternatif penyelesaian
4. Yang termasuk langkah-langkah dalam melakukan perencanaan operasional adalah....
- a. Menetapkan tujuan
  - b. Mengumpulkan informasi
  - c. Mengidentifikasi tujuan
  - d. Menyelesaikan perubahan
5. Dalam perencanaan operasional menurut Louis A. Allen. Perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya adalah....
- a. Menetapkan maksud tujuan
  - b. Mengidentifikasi hambatan
  - c. Merumuskan keadaan



- d. Membentuk alternatif
6. Yang dimaksud dengan menyusun anggaran belanja (budgeting) dalam perencanaan operasional adalah...
    - a. Mengarahkan segala keputusan
    - b. Menetapkan urutan waktu
    - c. Mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia
    - d. Memperkirakan waktu yang akan datang
  7. Yang harus diperhatikan dalam membuat rencana operasional penyelenggaraan pendidikan non formal adalah...
    - a. Kegiatan-kegiatan perencanaan operasional
    - b. Komponen-komponen rencana operasional
    - c. Prosedur operasional
    - d. Penyelenggaraan pendidikan non formal
  8. Berikut ini yang bukan komponen-komponen rencana operasional adalah...
    - a. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas
    - b. Latar belakang dan rasional
    - c. Dapat dicapai dalam waktu tahun tertentu
    - d. Rencana kegiatan dengan menentukan jenis dan tahap pekerjaan
  9. Sasaran kegiatan operasional yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut kecuali...
    - a. Sasaran harus sesuai dengan peraturan
    - b. Sasaran harus dapat dijabarkan
    - c. Sasaran harus mengacu pada masalah yang teridentifikasi
    - d. Evaluasi kinerja sekolah atau unit kerja
  10. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu...
    - a. Berorientasi pada hasil
    - b. Menantang namun dapat dicapai
    - c. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak
    - d. Dapat dinilai dan terukur.

## Essay

1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan operasional (operasional planning) ?
2. Apa saja prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional ?
3. Dalam melakukan perencanaan operasional, diperlukan langkah-langkah untuk melakukan perencanaan tersebut. Apa saja langkah yang harus dilakukan ?
4. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam perencanaan operasional ?
5. Dalam membuat perencanaan operasional penyelenggaraan pendidikan non formal. Tentu ada komponen yang harus diperhatikan. Sebutkan apa saja komponen-komponen tersebut ?

## **Jawaban**

### Pilihan ganda

1. C
2. D
3. B
4. A
5. A
6. C
7. B
8. A
9. D
10. C

### Essay

1. Perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih merinci.
2.
  - a. Mengumpulkan informasi dan analisa data
  - b. Menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan
  - c. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas
  - d. Membentuk alternatif-alternatif penyelesaian
  - e. Mengimplementasi, menilai dan memodifikasi
3.
  - a. Menetapkan tujuan
- b. Memahami atau merumuskan keadaan saat ini
  - c. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan
4.
  - a. Meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang
  - b. Menetapkan maksud tujuan (object)
  - c. Mengarahkan (programming)
  - d. Menyusun tata waktu (scheduling)
  - e. Menyusun anggaran belanja (budgeting)
  - f. Memperkembangkan prosedur-prosedur membuat standar

5. a. Latar belakang dan rasional
- b. Sasaran hasil yang akan diperoleh pada akhir kegiatan operasional
- c. Dapat dicapai dalam waktu tahun tertentu
- d. Indikator kinerja
- e. Rencana kegiatan dengan menentukan jenis dan tahap pekerjaan
- f. Sumber daya yang dicantumkan dalam rencana operasional
- g. Jadwal kegiatan
- h. Penanggungjawab kegiatan.

**BAB VIII**  
**PENGATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**NON FORMAL BAGI WARGA BELAJAR**

- I. Tujuan Perkuliahan : Membahas dan Berlatih Keterampilan Manajemen Dalam Pengaturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal
- II. Materi : Pengaturan Warga Belajar

**A. Pengelolaan Warga Belajar**

Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Menurut Winarno Hamiseno (Arikunto, 1986:8) pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Definisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien (Arikunto, 1986:8). Dijelaskan pula bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersama-sama menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan perkegiatan. Jadi pengelolaan warga belajar adalah pekerjaan mengatur warga belajar yang meliputi mendaftar, mencatat, menempatkan, melaporkan dan sebagainya.

Melebarnya pelaksanaan pendidikan nonformal seperti itu serta searah kondisi dan konsep belajar pendidikan non-formal, serta menjaga mutu dan

sensitivitas pendidikan non-formal di tengah-tengah masyarakat, maka lima strategi dasar yang perlu dikembangkannya adalah :

1. Pendekatan kemanusiaan (humanistic approach), masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan. Masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang dan sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya.
2. Pendekatan partisipatif (participatory approach), mengandung arti, bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.
3. Pendekatan kolaboratif (collaborative approach), dalam pembangunan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi.
4. Pendekatan berkelanjutan (continuation approach) pembangunan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan, untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat adalah hal yang paling pokok.
5. Pendekatan budaya (cultural approach) penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam pembangunan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan.

#### **B. Faktor - Faktor yang Perlu Diperhatikan Tenaga Pendidik Nonformal Dalam Menumbuhkan Kemandirian Warga Belajar**

Beberapa factor yang selalu harus menjadi perhatian tenaga pendidik pendidikan nonformal dalam membangun kemandirian warga belajar di antaranya adalah:

1. Kegiatan Pembelajaran berpusat pada peserta didik

Program pendidikan nonformal dalam konsep pengembangan program pembelajarannya seringkali dilakukan dan disusun bersama-sama antara sumber belajar dan warga belajar, ini berlaku sampai tahap evaluasi, disamping itu pula dalam konsep pembelajaran pendidikan nonformal warga belajar diberikan kewenangan untuk menyusun, dan melaksanakan program pembelajaran, serta melakukan evaluasi pada program tersebut secara mandiri. Prinsip dasar yang dijadikan pegangan adalah mengacu

pada konsep “dari, oleh, dan untuk warga belajar”. Sehingga peran sumber belajar (pamong, tutor, fasilitator) bertindak sebagai orang yang memberikan bimbingan, dorongan atau arahan bila diperlukan. Program pendidikan nonformal disusun atas dasar aktivitas warga belajar sendiri bukan berarti mau membantu warga belajar dalam mengembangkan kemampuannya. Akan tetapi justru hal tersebut sesuai dengan tugas sumber belajar yaitu membantu warga belajar dalam perkembangannya sendiri, membantu warga belajar agar dapat membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam diri warga belajar terdapat dorongan alamiah untuk berkreasi, dan untuk berkembang sendiri.

Ada beberapa cara dalam meningkatkan kreativitas warga belajar dalam program pendidikan nonformal diantaranya adalah :

- a. Menghadapkan warga belajar dengan berbagai permasalahan yang dialami atau dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari.
  - b. Mendorong warga belajar untuk selalu meneliti dan selalu ingin tahu apa-apa yang dianggap baru oleh mereka.
  - c. Mendorong dan memberi peluang warga belajar untuk selalu terjadi dialog, diskusi dalam kelompoknya atau dalam penyusunan suatu program pembelajaran.
  - d. Tutor bersama-sama warga belajar diupayakan memeriksa kembali apa yang telah dikerjakannya.
2. Kesesuaian isi program dengan sifat-sifat individualitas peserta didik

Dalam kerangka yang utuh, sebuah program pendidikan nonformal, isi dan jenis program yang dikembangkan (dalam bentuk dan satuan apapun), harus selalu memperhatikan perkembangan pribadi warga belajar, baik perkembangan yang sedang terjadi dimana program tersebut sedang digulirkan, maupun perkembangan pada masa yang akan datang. Dengan demikian dalam penentuan isi program pendidikan nonformal kerangka isi materi perlu terlebih dahulu didiskusikan bersama warga belajar maupun bersama orang-orang yang berkepentingan dengan warga belajar.

### 3. Faktor keturunan dan kesesuaiannya dengan isi program

Faktor keturunan (hereditas) adalah berupa bakat atau pembawaan yang ada dalam diri warga belajar. Faktor tersebut turut mempengaruhi warga belajar dalam mengikuti suatu program pendidikan nonformal. Contoh yang bisa diambil dari pernyataan tersebut adalah; warga belajar berbakat di bidang keterampilan tangan akan lebih tertarik, dan lebih termotivasi mengikuti pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan merajut dan anyaman dari pada yang berhubungan dengan keterampilan menyanyi atau kesenian lainnya. Pembawaan lain yang secara fitrah ada dalam diri manusia, bukan hanya berkaitan dengan unsur psikologis atau rohaniah, akan tetapi ada juga pembawaan yang bersifat biologis.

### 4. Kesesuaian isi program dengan faktor lingkungan (environmental factor)

Indikator-indikator yang berkaitan dengan itu adalah; lingkungan keluarga, teman bergaul teman bekerja, lapangan kerja, kelompok sosial dan sebagainya. Adapun lingkungan lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam pengembangan program pendidikan nonformal adalah lingkungan budaya dan lingkungan fisik. Lingkungan budaya bisa berupa adat istiadat, kebiasaan, norma, nilai-nilai, bahasa, atau hasil karya dan budi daya manusia. Sedangkan lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar, termasuk temperatur cuaca, iklim dll. Kurt Lewin secara tegas menyatakan lingkungan memberikan pengalaman dan mengembangkan kepribadian warga belajar. Sehingga keadaan lingkungan dan pengalaman warga belajar sangat berpengaruh terhadap aktivitas, motivasi dan tingkat kesuksesannya.

Model materi program pendidikan nonformal yang dikembangkan dan mampu menyatu dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan lingkungan, serta pengalaman warga belajar, akan memberikan semangat, dan akan mampu membangkitkan minat warga belajar. Hal lain yang dapat diperhatikan, bahwa kondisi kesesuaian tersebut akan mempermudah warga belajar dalam menyerap, dan memahami isi materi program yang



dikembangkan. Kondisi tersebut sejalan dengan satuan pendidikan nonformal serta model-model program yang saat ini dikembangkan, sebagai salah satu contoh apabila setiap hari masyarakat berhubungan dengan keterampilan (bordil, rajutan, menganyam, elektronik dll.) jika program kursus keterampilan dikembangkan di tengah-tengah itu dengan materi keterampilan yang cocok, maka masyarakat (warga belajar) yang mengikutinya akan dengan mudah dan cepat memahami, dan trampil.

#### 5. Kesesuaian isi program dengan potensi diri

Pendidikan nonformal dalam pengembangan programnya selalu mengacu pada asumsi potensi dan otonomi yang dimiliki warga belajar. Otonomi dan potensi tersebut selalu menjadi acuan utama bagi setiap perencanaan dan pengembangan program pendidikan nonformal, terutama sebelum program tersebut digulirkan. Secara filosofis pandangan tersebut sejalan dengan konsep humanistik. Hal tersebut sangat beralasan karena humanistik merupakan salah satu aliran filsafat yang memandang, bahwa manusia memiliki potensi dan otonomi dalam kehidupannya.

Oleh karena itu manusia tidak selalu tunduk begitu saja pada pengaruh dari pembawaan atau pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki keinginan dan kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination). Dimana manusia tidak selalu menggantungkan nasibnya pada keadaan yang ada, baik dalam dirinya maupun di luar dirinya, sehingga manusia wajib berusaha dan selalu optimis.

Nilai-nilai pedagogis yang ada dalam diri warga belajar merupakan keinginan yang sangat berharga. Atas dasar itu keinginan yang tumbuh dalam diri warga belajar didorong oleh adanya motif intrinsik dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya. Pada diri warga belajar akan berkembang perilaku yang selalu ingin berpacu, bersaing dalam belajar, tercipta dorongan ingin maju atau need for achievement (n'ach). Dimana tumbuh selalu ingin tahu, suka berkompetisi, selalu ingin ambil peran, dan mau berbuat lebih dari batas kemampuan mental fisiknya.

Ada kemampuan lain yang berpengaruh dalam diri warga belajar diantaranya adalah:

- a. Kesadaran (mind).
- b. Penyesuaian (adaptation).
- c. Imitasi (imitation)
- d. Identifikasi (identification).

Identifikasi faktor-faktor biologis dan psikologis manusia, di mana disebutkan bahwa manusia mempunyai seperangkat kemauan yaitu :

- a. Pengalamam baru (new experience)
- b. Penghargaan (recognition)
- c. Penguasaan (mastery)
- d. Keamanan (security)

Kecenderungan-kecenderungan tersebut harus mendapat perhatian yang nyata dalam setiap pengembangan materi program pendidikan nonformal, atau keinginan untuk merubah nasib, melalui kebebasan dalam belajar (autonomy) yang tumbuh dalam diri warga belajar harus selalu menjadi acuan tenaga pendidik pendidikan nonformal dalam mengembangkan program pembelajarannya.

6. Kesesuaian isi program pendidikan nonformal dengan perkembangan kehidupan

Fase khidupan manusia dalam perkembangannya tidak selalu linier. Pada fase-fase tertentu perkembangan kehidupan manusia kadang kala tenang, pada fase lain kadang kala mengalami kegoncangan dan krisis.

7. Kesesuaian makna dengan pengembangan program pendidikan nonformal

Materi pembelajaran akan bermakna, apabila bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masa depan, sehingga orang yang belajar terangsang untuk berpikir, berspekulasi dan mampu mengantisipasi peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Asumsi-asumsi tersebut memberi batasan yang sangat kuat bagi pengembangan isi program pendidikan nonformal yang dikatakan bermakna. Dalam arti setiap isi program pendidikan nonformal mempunyai makna bila mampu

mengembangkan pola pikir positif-inovatif dan produktif bagi warga belajarnya. Dari materi tersebut warga belajar mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang dialaminya dalam arti siap tanggap terhadap kehidupan masa kini dan masa depannya, serta terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu setiap materi program yang akan dibangun dan dikembangkan selalu dipertanyakan, makna yang terkandung di dalamnya, terutama makna bagi kehidupan dan penghidupan warga belajar serta lingkungannya. (Mustofa Kamil, hal, 9)

### **C. Cara Meningkatkan Efektifitas Pendidikan Non Formal**

Usaha untuk meningkatkan efektivitas pendidikan non formal bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan , walaupun pada sejarahnya pendidikan non formal sebetulnya lebih tua dari pada pendidikan formal. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan nonformal dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan non formal maupun komunitas pendidikan nonformal yaitu: pertama, perlu menata konsep yang tepat tentang program - program pendidikan non formal; kedua, perlu merencanakan program pendidikan non formal berbasis kebutuhan nyata arga belajar; ketiga,penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara tekun dan berkelanjutan dengan prinsip – prinsip manajemen yang lebih jelas. Sehingga kesannya pelaksanaan program pendidikan non formal bikan lagi bersifat sebagai sebuah proyek. Dimana ada dana disitu ada program, hal seperti inilah yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program pendidikan non formal. Selain itu untuk meningkatkan efektifits pendidikan nonformal dalam hal pengembangan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan upaya penataan ketenagaan baik dari segi pendidik maupun tenaga kependidikan pendidikan non formal yang lebih profesional yang mampu menata konsep yang tepat tentang pendidikan non formal dan dapat merencanakan program pendidikan non formal yang berbasis kebutuhan dan membangun kelembagaan pendidikan non formal.

Untuk melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam arti menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan non formal yang profesional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan karakteristik, yaitu memandang profesi sebagai seperangkat elemen inti yang membedakan dengan pekerjaan lain. Dimana karakteristik profesi tersebut meliputi:
  - a. Kemampuan intelektual yang diperoleh dari pendidikan
  - b. Memiliki pengetahuan spesialisasi
  - c. Memiliki kemampuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain
  - d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan
  - e. Mampu mengorganisasikan pekerjaan
  - f. Memiliki kode etik
  - g. Memiliki sanksi dan tanggungjawab
  - h. Memiliki sistem upah
  - i. Memiliki budaya profesi.
2. Pendekatan institusional, yaitu menekankan pengakuan atas suatu profesi oleh Negara atau pemerintah. Wilensky mengemukakan lima langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan yaitu:
  - a. Memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full time bukan pekerjaan sampingan
  - b. Menetapkan satuan pendidikan non formal tempat menjalani proses pendidikan dan pelatihan
  - c. Mendirikan organisasi atau asosiasi profesi
  - d. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut
  - e. Mengadopsi secara formal kode etik yang telah ditetapkan
3. Pendekatan legalistik yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan suatu profesi oleh Negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan

dapat disebut profesi jika dilindungi oleh undang – undang yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sani Susanti, hal.5)

### III. Simpulan

Dalam pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan non formal dengan warga belajar. Pengelolaan warga belajar adalah pekerjaan mengatur warga belajar yang meliputi mendaftar, mencatat, menempatkan, melaporkan dan sebagainya. Pada pelaksanaan pendidikan non formal ada lima strategi dasar yang perlu dikembangkan; 1) Pendekatan kemanusiaan (humanistic approach), 2) Pendekatan partisipatif (participatory approach), 3) Pendekatan kolaboratif (collaborative approach), 4) Pendekatan berkelanjutan (continuation approach), 5) Pendekatan budaya (cultural approach). Adapun dalam pendidikan non formal ini, ada beberapa faktor - faktor yang perlu diperhatikan tenaga pendidik nonformal dalam menumbuhkan kemandirian warga belajar yaitu, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, kesesuaian isi program dengan sifat-sifat individualitas peserta didik, faktor keturunan dan kesesuaiannya dengan isi program, kesesuaian isi program dengan faktor lingkungan (environmental factor), kesesuaian isi program dengan potensi diri, kesesuaian isi program pendidikan nonformal dengan perkembangan kehidupan, kesesuaian makna dengan pengembangan program pendidikan nonformal. Cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan nonformal dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan non formal maupun komunitas pendidikan nonformal itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S., 1986, *Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif*.

Jakarta: CV Rajawali,

Mustofa Kamil. *Membangun Kemandirian Warga Belajar*. Jurnal Pendidikan.

Sani Susanti. *Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Non Formal Dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya*

**BAB IX**  
**PENGATURAN PELAKSANAAN SUMBER BELAJAR DAN EVALUASI**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**I. Tujuan :**

1. Mahasiswa mampu memahami tentang pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan non formal
2. Mahasiswa mampu memahami pengaturan sumber belajar lembaga pendidikan nonformal
3. Mahasiswa mampu memahami evaluasi penyelenggaraan pendidikan non formal.

**II. Materi :** Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

**A. Pengertian Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**

1. Pengertian Pengaturan Pelaksanaan

Usman (2002) mengemukakan pengaturan pelaksanaan sebagai evaluasi. Dan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, jadi pengaturab pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dalam pengaturan pelaksanaan pendidikan dikalangan keluarga dilaksnakan dengan kontinu dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan pendidikan dikalangan keluarga sebagai bentuk dari

pendidikan formal, yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat membentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, karena didalam keluarga itu lebih banyak menekankan pada aspek pendidikan budi pekerti. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

## 2. Pengertian Sumber Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Zainuddin (1984) mengatakan sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, sebenarnya sumber belajar itu ada dimana-mana, baik itu sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar maupun yang secara alamiah tersedia di lingkungannya, baik itu yang berupa manusia maupun bukan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran. Mengklasifikasikan sumber belajar menjadi enam yakni:

- g. Manusia sumber (orang, masyarakat)
- h. Bahan pengajaran
- i. Situasi belajar (lingkungan)
- j. Alat
- k. Perlengkapan belajar
- l. Aktivitas (teknik) dan pesan.

Salah satu sumber belajar yang sudah lama diperlukan hingga saat ini dalam setiap lembaga pendidikan atau pelatihan adalah perpustakaan (library). Dalam penyelenggaraan suatu perguruan tinggi, pernah dikatakan bahwa perpustakaan adalah jantung suatu universitas. Dikatakan demikian karena perpustakaan yang



mengkoleksi berbagai macam buku dan journal dari pelbagai disiplin ilmu pengetahuan sungguh sangat diperlukan oleh suatu universitas. perpustakaan. Universitas-universitas yang ternama di dunia selalu mempunyai perpustakaan pusat (main library) yang besar dengan koleksi buku-buku yang sangat banyak jumlahnya hingga ratusan ribu sampai jutaan buku dalam berbagai jenis disiplin ilmu pengetahuan dalam terbitan yang relatif baru ditambah dengan koleksi berbagai jenis jurnal ilmiah. Di samping itu di universitas tersebut terdapat juga adanya perpustakaan fakultas (school library) di setiap fakultasnya untuk mendukung kegiatan belajar para mahasiswanya di masing-masing fakultas. Perpustakaan merupakan perkembangan awal dari Pusat Sumber Belajar. Semua bahan belajar berupa rinted materials yang telah dimiliki dan dikoleksi oleh bagian atau unit yang dinamakan Perpustakaan dipelihara dan disimpan dengan menggunakan sistem klasifikasi tertentu untuk memudahkan pemanfaatannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar memegang peranan penting dan cukup menentukan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Untuk dapat mendayagunakan sumber belajar secara optimal perlu mempertimbangkan sasaran, macam-macam dan langkah-langkah pendaayagunaannya. Betapapun tingginya nilai kegunaan sumber belajar, tidak akan memberi manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Oleh karena itu guru/dosen dituntut memiliki kemampuan menggunakan sumber belajar.

### 3. Pengertian Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non formal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran seperti penyuluhan dan kelompok belajar serta proses

pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

## **B. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**

### **1. Pengertian Evaluasi**

Grotelueschen (1976) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini, maka evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata evaluasi berarti penilaian. Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris “evaluation” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

Sihombing, (2001) Evaluasi perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus, bukan hanya pada akhir kegiatan pembelajaran. “ Apabila evaluasi hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran (catur wulan) maka ada kecenderungan peserta didikpun hanya akan belajar pada waktu menjelang akhir kegiatan pembelajaran itu, dan ini akan mempengaruhi mutu hasil belajar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bentuk dan frekuensi evaluasi yang dilakukan mempengaruhi tingkah laku belajar peserta didik dan mutu hasil belajar.

### **2. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**

Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah, pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat/warga negara yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan fisik. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

PKBM diselenggarakan sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidupnya. PKBM dikatakan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat, karena di dalamnya menyediakan berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti: Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus-kursus, KBU, dan jenis pendidikan lainnya. Pada umumnya pengelola dan penyelenggaran PKBM adalah masyarakat, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, melalui Subdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di tingkat propinsi atau kabupaten/kota). Jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik. Ada beragam satuan pendidikan nonformal yang dikembangkan masyarakat saat ini. Satuan pendidikan nonformal lainnya adalah kelompok belajar (Kejar), yaitu satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

### **C. Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.**

Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kulikuler, kokulikuler dan ekstrakulikuler. Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar ada dua macam alat evaluasi yakni tes dan non tes. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada tiga jenis tes yaitu;

1. Tes diagnostic
2. Tes formatif
3. Tes sumatif

Hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Ada dua kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik antara lain:

1. Program remedial
2. Program pengayaan

Fungsi evaluasi program, adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan/ atau telah dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai fungsi evaluasi adalah untuk mencari jawaban tentang: (1) tujuan evaluasi, (2) pendekatan evaluasi, (3) aspek-aspek yang dievaluasi, (4) metode dan teknik evaluasi, dan (5) langkah-langkah evaluasi. Evaluasi terhadap hasil evaluasi berhubungan dengan penggunaan hasil evaluasi dalam proses pengambilan keputusan, sejauh mana masukan dapat digunakan sepenuhnya, sebagian, atau mungkin tidak digunakan sama sekali. Sejauh mana pula hasil evaluasi digunakan untuk memutuskan tentang penghentian program, perbaikan atau modifikasi program, perluasan dan peningkatan program.

### **III. Kesimpulan**

Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non formal ini sangat berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pendidikan non formal dibutuhkan komponen-komponen penunjang untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Pengaturan pelaksanaan sumber belajar ini mengenai tentang bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang didapatkan didalam proses penyelenggaraan pendidikan non formal seperti bahan ajar, alat dalam menunjang pembelajaran seperti buku dan lain sebagainya.

Dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model seperti penilaian terhadap peserta didik dalam poses pembelajaran berlangsung.

#### **Soal Dan Jawaban :**

##### **Pilihan Ganda :**

1. Dalam metode-metode evaluasi program terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut...
  - a. Metode historis, survey, pengembangan dan kasus
  - b. Metode lama, pelaksanaan, kerja kelompok, dan pelatihan
  - c. Metode baru, pengembangan, laporan, dan kasus
  - d. Metode historis, laporan, sumber belajar dan pelatihan
2. Tujuan evaluasi pendidikan luar sekolah beraneka ragam, yaitu sebagai berikut...
  - a. Memberi masukan bagi perencana program
  - b. Pemberian penghargaan
  - c. Pelaksanaan program
  - d. Pengorganisasian program
3. Menurut John M. Echlos dan Hasan Sadili (1983) dalam Drs. M.Chabib Thoha, M. A, (2003: 1) evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penaksiran atau penilaian. Sedangkan menurut istilah adalah....

- a. Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan tujuan bersama secara efektif dan efisien
  - b. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan suatu instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.
  - c. Evaluasi merupakan kegiatan bersama untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya
  - d. Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk menilai dan memberikan keuntungan yang efektif dan efisien
4. Evaluasi program mengandung 3 unsur penting yaitu Kecuali....
    - a. Kegiatan sistematis
    - b. Data
    - c. Pengambilan keputusan
    - d. Penilaian
  5. Untuk mencapai tujuan evaluasi maka, dibutuhkan teknik evaluasi program PLS/Pelatihan untuk orang dewasa yaitu sebagai berikut Kecuali...
    - a. Angket
    - b. Wawancara
    - c. Pelaksanaan
    - d. Studi dokumentasi
  6. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, jadipengaturab pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi

- kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.  
Pendapat tersebut di kemukakan oleh?
- a. Drs. M.Chabib Thoha, M. A, (2003: 1)
  - b. John M. Echlos
  - c. Hasan Sadili (1983)
  - d. Usman (2002)
  - e. Wahyu bagja sulfemi, M.Pd.
7. Sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. siapa yang mengemukakan pendapat di atas?
- a. Drs. M.Chabib Thoha, M. A, (2003: 1)
  - b. John M. Echlos
  - c. Hasan Sadili (1983)
  - d. Usman (2002)
  - e. Zainuddin(1984)
8. Ada dua kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik. Sebutkan?
- a. Program remedial dan Program pengayaan
  - b. program pembelajaran dan pengajaran
  - c. program penelitian dan analisis
  - d. program ulangan harian dan ulangan pekanan
  - e. program tengah semester dan program akhir tahun
9. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada tiga jenis tes. Sebutkan?
- a. Tes diagnostic, Tes formatif dan Tes sumatif
  - b. Tes fisik, tes psikotes dan tes IQ
  - c. Tes emosional, Tes mental dan Tes formatif
  - d. Tes diagnostic, Tes formatif dan tes IQ
  - e. Tes fisik, Tes formatif dan Tes sumatif
10. Pertanyaan-pertanyaan mengenai fungsi evaluasi adalah untuk mencari jawaban tentang?



- a. tujuan evaluasi,
- b. pendekatan evaluasi,
- c. aspek-aspek yang dievaluasi,
- d. metode dan teknik evaluasi, dan langkah-langkah evaluasi
- e. semua benar

**Essay :**

1. Apa yang dimaksud dengan Evaluasi program?
2. Sebutkan tujuan dari evaluasi program PLS/Pelatihan orang dewasa secara khusus?
3. Sebutkan pendapat usman mengenai pengaturan pelaksanaan!
4. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik, ada berapakan jenis tesnya? Sebutkan?
5. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, sebenarnya sumber belajar itu ada dimana-mana, baik itu sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar maupun yang secara alamiah tersedia di lingkungannya, baik itu yang berupa manusia maupun bukan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran. Mengklasifikasikan sumber belajar menjadi enam yakni. Sebutkan!

**Jawaban**

**Pilihan Ganda :**

1. A      6. D
2. A      7. D
3. B      8. A
4. D      9. A
5. C      10. D

**Essay :**

1. Evaluasi program merupakan alat dalam management program. perencanaan pengorganisasian, penggerakan pembinaan dll sebagai masukan dalam pengambilan keputusan mengenai setiap fungsi manajemen PLS.

2. Tujuan dari evaluasi program PLS/Pelatihan orang dewasa secara khusus untuk memberi masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, hasil program pendidikan, kurikulum, tanggapan masyarakat terhadap program, sumber daya program pendidikan, dampak pembelajaran, manajemen pendidikan, dan sebagainya.
3. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, jadi pengaturab pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
4. Ada 3, Tes diagnostic, Tes formatif dan Tes sumatif
5.
  - a. Manusia sumber (orang, masyarakat)
  - b. Bahan pengajaran
  - c. Situasi belajar (lingkungan)
  - d. Alat
  - e. Perlengkapan belajar
  - f. Aktivitas (teknik) dan pesan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Grotelueschen, Arden G. Program Evaluation. (dalam Alan B. Knox (1980).  
Developing, Administering, and Evaluating Adult Education. Sans  
Francisco: Jossey-Bass Publishers.

**BAB X**  
**MENGATUR PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Tujuan** : 1. Mahasiswa mampu memahami tentang pendidikan nonformal  
2. Mahasiswa mampu memahami pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nonformal

**Materi** : Mengatur Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

**A. Pengertian Pendidikan Nonformal**

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan (*education*) secara semantik berasal dari bahasa Yunani *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Pedagogos* adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para *paedagogos*. Istilah ini berasal dari kata *paedos* yang berarti anak, dan *agogos* yang berarti saya membimbing atau memimpin.

Menurut Langeveld (1971: 5) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datang dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## 2. Pengertian Pendidikan Nonformal

Menurut Coombs, pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan apakah dilakukan secara terpisah atau seagian bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Abdul Rahmat, pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan dan latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakatnya dan negaranya. Pendidikan nonformal adalah transmisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan dan sistematis (dengan penekanan terhadap peningkatan keterampilan) di luar teknologi pendidikan persekolahan formal, dengan suatu susunan struktur waktu, tempat, sumber-sumber dan warga belajar yang beragam akan tetapi terarahkan. (Abdul Rahmat:4)

## **B. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

### **3. Pengertian Pembiayaan**

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.

Menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi pembiayaan adalah suatu hak dengan hak mana seseorang dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu.

### **4. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

#### **a. Pembiayaan Pemerintah**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

Pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62

mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”.

Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat

untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.

Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan keterampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran, maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan; untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar; untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib



menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

Dalam Sebuah Jurnal yang di tulis Armida (vol 26 No. 1; 2011) mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a. Flat Grand Model Flat Grand

Model menggunakan system distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

b. Equalization Model Equalization

Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan mereima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah.

b. Pembiayaan Lembaga Kursus

Dalam mengelola Pendidikan non Formal terdapat dua faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan secara efektif

dan efisien. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal antara lain masyarakat yang merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan, oleh karena itu masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan sehingga memahami seluruh kebutuhan Lembaga Pendidikan, terutama yang menyangkut sumber dana yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Di samping itu masyarakat juga termasuk di dalamnya (faktor eksternal) adalah kebijakan pemerintah, faktor lingkungan, politik, sosial dan budaya, serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi dan kondisi suatu negara.

Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor internal termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Pendidikan antara lain: pengelolaan/manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, manajemen hubungan Lembaga Pendidikan dan masyarakat, manajemen peserta didik, pengawasan dan penilaian pendidikan. Faktor eksternal dan internal adalah dua faktor yang saling berpengaruh di mana keduanya merupakan hal yang sama-sama berfungsi dan berperan dalam pencapaian tujuan. Masyarakat instansi Pemerintah ,swasta dunia usaha dan Industri sebagai pengguna jasa turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan cara berpartisipasi dalam pengadaan dana, karena salah satu faktor penyebab belum tercapainya kualitas, adalah karena keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Seperti diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). (Idochi Anwar 2000:87).

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan lembaga pendidikan akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan

pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991).

Berikut ini upaya strategis lembaga pendidikan swasta (kursus) dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pendidikan, antara lain:

1. Menarik Dana Langsung dari masyarakat dalam bentuk Biaya kursus yang terjangkau.
2. Segmentasi pasar siswa kursus untuk anak-anak. Misalnya anak-anak Lembaga Pendidikan taman kanak-kanak dan anak SD dengan program yang menarik dan mendidik.
3. Memanfaatkan media sosial dan penjualan jasa, maupun barang secara online.
4. Membangun komunikasi dengan Dunia usaha dan industry untuk menjalin kerjasama pelatihan keterampilan dengan konsep kerjasama saling menguntungkan, artinya pihak perusahaan bisa melatih calon tenaga kerja dengan low Cost biaya rendah. Dari hasil kerjasama yang saling menguntungkan ini pihak lembaga pendidikan swasta (lembaga kursus) bisa memperoleh dana. Hal ini dilakukan oleh beberapa kursus mengemudi untuk tenaga supir baik dalam maupun luar negeri contoh yang dilakukan oleh LKP Ekajaya Berindo.
5. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan dalam hal pelatihan Komputer. Kurikulum 2013 mengisyaratkan mata pelajaran TIK khususnya computer banyak di beberapa Lembaga Pendidikan dihilangkan hal ini dengan alasan bahwa semua guru mengaruskan melek teknologi informasi. Sementara sekarang

- dituntut Lembaga Pendidikan melakukan Ujian nasional Berbasis Komputer. Ini merupakan kebijakan yang berbuah menjadi peluang.
6. Kerjasama menyewakan peralatan kepada Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan yang tidak memiliki sarana computer yang cukup untuk UNBK.
  7. Kerjasama perawatan dan pemeliharaan computer, Jasa service , jasa Instal dan jasa pembuatan Jaringan.
  8. Kerjasama pemasangan CCTV Dan masih banyak lagi yang bias digarap yang penting setiap manajer kursus pandai membaca peluang. (Endang Herawan, hal: 3, 2017)

### **Kesimpulan**

Pengelolaan keungan lembaga pendidikan non formal (khususnya lembaga kursus) merupakan salah satu substansi manajemen lembaga kursus itu sendiri yang akan turut menentukan berjalannya penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Sumber pendanaan lembaga kursus yang pada umumnya bersumber dari masyarakat dan pemerintah sebagai stimulan mengharuskan lembaga mempersiapkan perencanaan sampai dengan evaluasi terhadap sumber pendanaan lembaga tersebut.

Strategi kemitraan yang dibangun dengan lembaga pemerintah atau lembaga lainnya memungkinkan meningkatkan sumber dana dan keberlangsungan lembaga itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga non formal diantaranya dibentuknya himpunan lembaga kursus seperti Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI), menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pendidikan serta instansi terkait, untuk peningkatan kompetensi siswa, mengadakan workshop dan sebagainya. Pengelolaan administrasi keuangan juga perlu menerapkan prinsip-prinsip laporan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat berjalan dengan transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

**Soal Dan Jawaban :**

**Pilihan Ganda :**

1. Seorang nelayan atau bujangan dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke sekolah dan dari sekolah. Pengertian menurut apakah ini?
  - a. Paidagogia
  - b. Pedagogos
  - c. Paedagogos
  - d. Paedos
2. Apakah yang dimaksud dengan pengertian pendidikan nonformal menurut Coomb?
  - a. Setiap kegiatan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan apakah dilakukan secara terpisah atau sebagian bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.
  - b. Setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan dan latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakatnya dan negaranya.
  - c. Setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri
  - d. Transmisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan dan sistematis (dengan penekanan terhadap peningkatan keterampilan) di luar teknologi pendidikan persekolahan formal, dengan suatu susunan

struktur waktu, tempat, sumber-sumber dan warga belajar yang beragam akan tetapi terarahkan.

3. Dalam mengelola Pendidikan non Formal terdapat dua faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Ada faktor internal dan eksternal. Manakah yang termasuk faktor eksternal dalam mengelola pendidikan non formal ini?
  - a. Kebijakan pemerintah, faktor lingkungan, politik, sosial dan budaya, serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi dan kondisi suatu negara.
  - b. Pengelolaan/manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, manajemen hubungan Lembaga Pendidikan dan masyarakat, manajemen peserta didik, pengawasan dan penilaian pendidikan.
  - c. Faktor lingkungan, politik, pengawasan dan penilaian pendidikan.
  - d. Manajemen kurikulum, manajemen hubungan Lembaga Pendidikan dan masyarakat.
4. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pengertian pembiayaan menurut siapakah itu?
  - a. Harbison dan Myers, 1964
  - b. Coombs
  - c. M. Syafi'i Antonio
  - d. Idochi Anwar 2000:87
5. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan lembaga pendidikan akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian dalam kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses apa saja?
  - a. Perencanaan, pengorganisasian, evaluasi
  - b. Perencanaan, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban

- c. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
  - d. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian, dan evaluasi
6. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban. Pengertian menurut siapakah ini?
- a. Abdul Rahmat:4
  - b. Idochi Anwar 2000:87
  - c. Lipham, 1985; Keith, 1991
  - d. Harbison dan Myers, 1964
7. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan itu terdiri atas biaya apa saja?
- a. Biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
  - b. Biaya pengeluaran, biaya investasi
  - c. Biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap
  - d. Biaya investasi, biaya pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
8. Yang bukan termasuk Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu?
- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
  - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi
  - d. Biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

9. Dalam mengelola Pendidikan non Formal terdapat dua faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Manakah yang termasuk faktor internal?
- Kebijakan pemerintah, faktor lingkungan, politik, sosial dan budaya, serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi dan kondisi suatu negara.
  - Pengelolaan/manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, manajemen hubungan Lembaga Pendidikan dan masyarakat, manajemen peserta didik, pengawasan dan penilaian pendidikan.
  - Sosial dan budaya, serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi dan kondisi suatu negara.
  - Pengelolaan/manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, kebijakan pemerintah, faktor lingkungan.
10. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan lembaga pendidikan akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri.. pada kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses apa saja?
- Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
  - Pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.
  - Perencanaan, pengarahan , evaluasi, pengorganisasian.
  - Pemeriksaan dan petanggungjawaban.

**Jawaban Pilihan Ganda :**

- C
- A
- A
- C
- D
- C
- A



8. D
9. B
10. A

**Essay :**

1. Apa isi dari pengertian pendidikan non formal menurut Coombs?
2. Menurut John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu Flat Grand Model Flat Grand dan Equalization Model Equalization. Tolong jelaskan isi dari model Flat Grand Model Flat Grand!
3. Dalam mengelola Pendidikan non Formal terdapat dua faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Coba jelaskan yang di maksud dengan faktor internal dan eksternal dalam mengelola pendidikan non formal!
4. Apa saja upaya strategis lembaga pendidikan swasta (kursus) dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pendidikan, minimal 3 point isi!
5. Tolong jelaskan isi dari Pada Bab IX tentang Standar Pembiayaan, Pasal 62!

**Jawaban Essay:**

1. Menurut Coombs, pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan apakah dilakukan secara terpisah atau seagian bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.
2. Model Flat Grand Model Flat Grand yaitu model menggunakan system distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai

kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

3. - Faktor Internal termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Pendidikan antara lain: pengelolaan/manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, manajemen hubungan Lembaga Pendidikan dan masyarakat, manajemen peserta didik, pengawasan dan penilaian pendidikan.
  - Faktor Eksternal antara lain masyarakat yang merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan, oleh karena itu masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan sehingga memahami seluruh kebutuhan Lembaga Pendidikan, terutama yang menyangkut sumber dana yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.
4. - Menarik Dana Langsung dari masyarakat dalam bentuk Biaya kursus yang terjangkau.
  - Segmentasi pasar siswa kursus untuk anak-anak. Misalnya anak-anak Lembaga Pendidikan taman kanak-kanak dan anak SD dengan program yang menarik dan mendidik.
  - Memanfaatkan media sosial dan penjualan jasa, maupun barang secara online
5. - Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
  - Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
  - Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
    - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
    - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. Idochi. 2000. *Transformasi Biaya Pendidikan dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Bandung*. Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Arison, Hendry. 1999. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muammalah Institut. hal. 25.
- Armida. 2001. *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Media Akademika. Vol. 26. No. 1. Januari 2001.
- Coombs, P.H. and Ahmed, M. 1974. *Attacking Rural Poverty: How Education Can Help*. Baltimore: John Hop Kins University Press.
- Wiratomo, Paulus. 1986. *Indonesian Non Formal Education Program. Problems of Access and The Effect of The Programs on The Attitudes of Learners*. Albany: State University of New York.
- Herawan, Endang. Yana, Enceng. *Analisis Pembiayaan Pendidikan*. Lembaga Pendidikan Swasta FKIP Uswayati. Cirebon.
- Keith, Davis. 1991. *Human Behavior at Work Organizational Behavior 9 six The Education New York Mc. Grew-bil Graw-hil, Inc*.
- Langeveld. 1971. *Paedagogik Teoritis/Sistematis*. Jakarta: FIP-IKIP.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: UPP AMP YKPM. hal. 17.
- Muhammad, Syafi'i. Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 160.
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.  
PP No. 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom*.
- Kepmendiknas No. 53/U/2001 *Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan*.  
Kepmendiknas No.129/U/2004 *Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan*.  
(hasil revisian).
- Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Bab 1 dan 3. *Pendidikan Non Formal*.
- Rahmat, Abdul. 2017. *Manajemen Pendidikan Non Formal*. Jawa Timur: Penerbit Wade.